

**ANALISA PERKEMBANGAN EKONOMI PASCA COVID-19 DI WILAYAH
SUMBAGUT (SUMATERA BAGIAN UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

Nama : Villy Pramesti Supomo

NPM : 1905180027

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

2024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada Hari Kamis, Tanggal 9 Januari 2025 Jam 08. 30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : VILLY PRAMESTI SUPOMO
N P M : 1905180027
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Konsentrasi : RISET EKONOMI DAN BISNIS
Judul Skripsi : ANALISA PERKEMBANGAN EKONOMI PASCA COVID-19
DI WILAYAH SUMBAGUT (SUMATERA BAGIAN UTARA)

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si)

Penguji II

(SRI ENDANG RAHAYU, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Prawidya Hariani, S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh :

Nama : VILLY PRAMESTI SUPOMO
NPM : 1905180027
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Penelitian : ANALISA PERKEMBANGAN EKONOMI PASCA
COVID-19 DI WILAYAH SUMBAGUT (SUMATERA
BAGIAN UTARA)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan tugas akhir.

Medan, November 2024

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si.



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE., MM., M.Si., CMA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Villy Pramesti Supomo
NPM : 1905180027
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset Ekonomi dan Bisnis
Judul Skripsi : Analisa Perkembangan Ekonomi Pasca Covid-19 di Wilayah Sumbagut (Sumatera Bagian Utara)

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari tugas akhir ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 9 Januari 2025

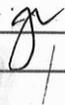
Yang membuat pernyataan



VILLY PRAMESTI S.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : VILLY PRAMESTI SUPOMO
NPM : 1905180027
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : Jl. BZ HAMID KOMP. LAGUNA INDAH NO.17 C
Judul Skripsi : ANALISA PERKEMBANGAN EKONOMI PASCA COVID 19 DI WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf
7 Feb 2024	Revisi Bab IV Kondisi Geografis di Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) * Luas Wilayah Sumatera Bagian Utara * Demografi	
16 Feb 2024	* Perkembangan indikator ekonomi di wilayah Sumatera Bagian Utara (Pertumbuhan ekonomi, PDRB, PDRB per kapita, Inflasi, Gini Ratio) * Perkembangan Indikator sosial di wilayah Sumatera Bagian Utara (Indeks Pembangunan Manusia, dan kemiskinan)	
21 Feb 2024	Komponen IPM (Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran per kapita) dan Kemiskinan (Tingkat Kemiskinan, Jumlah Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Garis Kemiskinan)	
7 Maret 2024	Revisi Bab V Kesimpulan Saran	
30-4-24	Acc ul diujikan sidang	

Pembimbing Skripsi



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Medan, April 2024
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

ABSTRAK

Villy Pramesti Supomo

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Email : villypramesti0507@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa perkembangan ekonomi pasca covid-19 di wilayah Sumbagut. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di wilayah Sumbagut dapat dikatakan baik. Dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, PDRB, PDRB per kapita, dan gini ratio yang menurun. Sayangnya, inflasi di wilayah Sumbagut mengalami peningkatan di tahun 2022. Walaupun inflasi mengalami peningkatan, namun masih termasuk di kategori inflasi ringan. Faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan ekonomi adalah kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Meskipun kemiskinan menurun dan indeks pembangunan manusia meningkat setiap tahunnya, tetapi rata-rata lama sekolah tidak mencapai target. Sektor yang mendominasi di wilayah Sumatera bagian Utara adalah sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor perdagangan besar dan eceran.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Sumatera Bagian Utara, PDRB

ABSTRACT

ABSTRAK

Villy Pramesti Supomo

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Email : villypramesti0507@gmail.com

This research aims to analyze post-covid-19 economic development in the Sumbagut region (Northern Sumatra). This research method uses quantitative descriptive methods. The results of this research indicate that economic development in the Northern Sumatra region can be said to be good. It can be seen from the increase in economic growth, GRDP, GRDP per capita, and the decreasing Gini ratio. Unfortunately, inflation in the North Sumatra region will increase in 2022. Even though inflation has increased, it is still in the mild inflation category. Social factors that influence economic development are poverty and the human development index. Even though poverty is decreasing and the human development index is increasing every year, the average length of schooling does not reach the target. The sectors that dominate in the North Sumatra region are the processing industry, agriculture, forestry and fisheries sectors, as well as the wholesale and retail trade sectors.

Keywords: Economic Growth, North Sumatra, GRDP

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Serta *Shalawat* berangkaikan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisa Perkembangan Ekonomi Pasca Covid-19 di Wilayah Sumbagut**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis memohon maaf danmengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak dukungan, bantuan, bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orangtua saya dan semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada :

1. Allah SWT yang telah Memberikan Rahmat serta rezeki-Nya yang luar biasa, nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada saya. Dan atas izin-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi penelitian ini.
2. Ibu saya Lenny Elvina, yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu menjadi penyemangat saya, memberikan dukungan kepada saya dalam menghadapi segala proses yang saya jalani dan membuat saya kuat dalam menghadapi segala situasi dan menjadi orang tua yang hebat selama hidup saya.
3. Almarhum Ayah saya Herry Supomo, yang menghidupi kami sehingga bisa sampai di titik ini adalh ayah yang hebat dalam hidup saya.

4. Adek-adek saya Teguh Indiarjo Supomo dan Trisna Monica Supomo yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dalam segi apapun, baik materi maupun moril

5. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Januri, SE, MM, M.Si, SMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

8. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

9. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sekaligus Dosen Pembimbing Saya dan Ibu Dra. Hj. Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

10. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang turut berkontribusi dalam segala urusan perkuliahan dan administrasi penulis selama mengikuti perkuliahan

11. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis stambuk 19 Ekonomi Pembangunan yang serta memberikan semangat, kesenangan dan motivasi. Demikianlah yang dapat disampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca

Wabillahitaufiqwalhidayah Wassamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 10 Maret 2024

Penulis

VILLY PRAMESTIS.

1905180027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	6
DAFTAR GRAFIK	9
DAFTAR TABEL	10
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang.....	11
1.2. Identifikasi Masalah.....	21
1.3. Batasan Masalah.....	21
1.4. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.....	22
1.4.1. Rumusan Masalah.....	22
1.4.2. Tujuan Penelitian.....	22
1.5. Manfaat Penelitian.....	22
1.5.1. Manfaat Akademik.....	22
1.5.2. Manfaat Non Akademik.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1. Landasan Teori.....	24
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	24
A. Pertumbuhan Ekonomi Klasik.....	26
B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes.....	31
C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik.....	32
2.1.2. Teori Pendapatan Nasional.....	36
A. Metode Penghitungan PDRB.....	37
B. PDRB Per Kapita.....	38
2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	40
A. Harapan Hidup.....	43
B. Rata-Rata Lama Sekolah.....	44
C. Harapan Lama Sekolah.....	44
D. Pengeluaran per Kapita.....	44

2.2. Regulasi/Kebijakan Pemerintah.....	45
A. Pemerataan Ekonomi	45
B. Pengembangan Ekonomi Daerah	48
C. Indeks Pembangunan Manusia.....	52
2.3. Inflasi	55
A. Pengertian Inflasi	55
B. Jenis Inflasi.....	56
C. Indikator Inflasi	58
D. Dampak inflasi	59
2.4. Gini Ratio.....	60
A. Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan.....	61
B. Dampak Ketimpangan Pendapatan	62
2.5. Kemiskinan	63
A. Tingkat Kemiskinan.....	64
B. Garis Kemiskinan.....	65
C. Indeks Kedalaman Kemiskinan.....	66
D. Jumlah Penduduk Miskin.....	66
2.6. Kerangka Konseptual.....	73
BAB III METODE PENELITIAN	74
3.1. Pendekatan Penelitian	74
3.2. Defenisi Operasional.....	74
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	75
A. Tempat Penelitian	75
B. Waktu Penelitian	75
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	75
A. Jenis Data	75
B. Sumber Data.....	75
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	76
3.6. Teknik Analisis Data.....	76

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	78
4.1. Gambaran Umum.....	78
4.1.1. Kondisi Geografis	78
4.1.2. Demografi	81
4.2. Perkembangan Indikator Ekonomi dan Sosial Pasca Covid-19 di Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).....	82
4.2.1. Indikator Ekonomi di Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut)	82
1. PDRB (Product Domestic Regional Bruto)	82
2. PDRB per Kapita	83
3. Pertumbuhan Ekonomi.....	84
4. Inflasi	85
5. Gini Ratio.....	86
4.2.2. Indikator Sosial di Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut)	87
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	87
2. Kemiskinan	89
4.2.3. Sektor yang Mendominasi di Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) pada Tahun 2020-2022	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
5.1. Kesimpulan	103
5.2. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	110

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Data Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2018-2022 (Persen).....	13
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2018-2022 (Persen).....	14
Tabel 1.2. Data Pertumbuhan Ekonomi (Persen) di Wilayah Sumatera Bagian Utara Pada Tahun 2018-2022	14
Tabel 1.3. Data PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) di Indonesia Pada Tahun 2018-2022.....	16
Tabel 1.4. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) di Pulau Sumatera Pada Tahun 2018-2022	20
Tabel 1.5. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) di wilayah Sumatera Bagian Utara Pada Tahun 2018-2022	20
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	69
Tabel 4.1. Luas Wilayah Sumatera Bagian Utara Tahun 2022	80
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk di Wilayah Sumatera Bagian Utara (Jiwa) Pada Tahun 2022	81
Tabel 4.3. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) di Wilayah Sumatera Bagian Utara Pada Tahun 2020-2022.....	82
Tabel 4.4. Data PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rupiah) di Wilayah Sumatera bagian Utara Pada Tahun 2020-2022.....	83
Tabel 4.5. Data Pertumbuhan Ekonomi (Persen) di Wilayah Sumatera Bagian Utara Pada Tahun 2020-2022	85
Tabel 4.6. Tingkat Inflasi (Persen) di Wilayah Sumatera Bagian Utara Pada Tahun 2020-2022	86
Tabel 4.7. Gini Ratio di Wilayah Sumatera Bagian Utara Pada Tahun 2020-2022.....	87
Tabel 4.8. Angka Harapan Hidup (Tahun), Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), Harapan Lama Sekolah (Tahun), dan Pengeluaran per Kapita (Ribu) di Wilayah Sumatera Bagian Utara Pada tahun 2020-2022	88
Tabel 4.9. Tingkat Kemiskinan (Persen), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa), Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan (Rupiah) di Wilayah Sumatera Bagian Utara Pada Tahun 2020-2022	91
Tabel 4.10. PDRB Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, Pada Tahun 2020-2022 Dalam Satuan Juta Rupiah	92

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Produk Domestik Bruto menjadi indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dimana, apabila nilai dari persentase Produk Domestik Bruto mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut meningkat. Meningkatnya produk domestik bruto di suatu negara merupakan ukuran keberhasilan kesejahteraan masyarakat yang merata di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil setiap tahun, berarti kesejahteraan ekonomi meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti tingkat kesejahteraan di suatu negara juga menurun. Tinggi rendah laju pertumbuhan ekonomi disuatu negara menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi disuatu negara, menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di negara tersebut.

Pada dasarnya, perkembangan ekonomi adalah indikasi dari adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan perubahan kondisi dari perekonomian suatu negara yang secara berkesinambungan menuju ke keadaan yang lebih baik selama satu periode. Perkembangan ekonomi ini mengikuti dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Perkembangan ekonomi lebih kearah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan atau lainnya mengalami perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka perkembangan ekonomi semakin baik. Begitu juga sebaliknya.

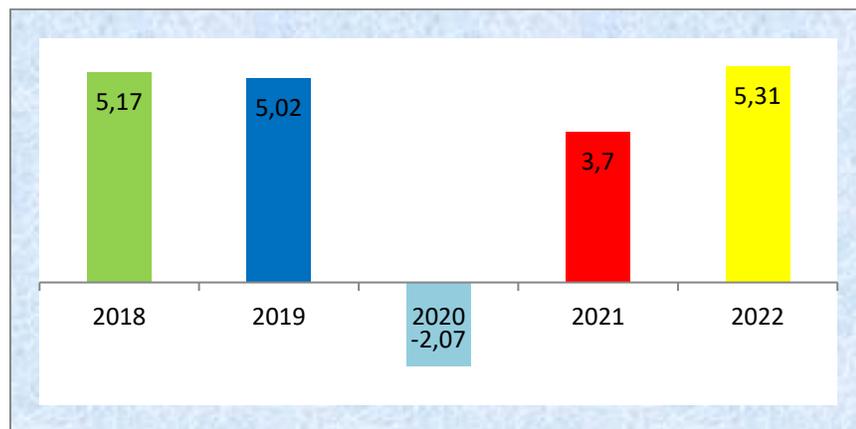
Perkembangan ekonomi memiliki dua indikator, yaitu indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi dalam perkembangan ekonomi adalah nilai PDRB, PDRB per Kapita, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan gini ratio. Sedangkan indikator sosial dalam perkembangan ekonomi adalah kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Perkembangan ekonomi di Indonesia ini termasuk kuat karena menunjukkan peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Perekonomian Indonesia tetap tumbuh pada triwulan IV tahun 2022 meskipun mengalami perlambatan sebesar 5,0 persen (YoY). Perekonomian Indonesia

yang sedikit termoderasi disebabkan siklus perekonomian yang melambat menjelang akhir tahun, serta *base-effect* yang lebih tinggi pada triwulan IV tahun 2021. Namun demikian, kinerja perekonomian tetap terjaga yang ditopang oleh mobilitas masyarakat yang semakin pulih, tercermin dari peningkatan di sektor pariwisata, daya beli masyarakat yang masih terus terjaga, serta aktivitas produksi yang semakin terekspansi. Sementara itu, kinerja perekonomian Indonesia keseluruhan tahun 2022 menguat menjadi sebesar 5,31%, kembali seperti sebelum pandemi.

Grafik 1.1. Data Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa sebelum pandemi covid-19 pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,15%. Saat pandemi covid-19 pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Indonesia turun drastis alias anjlok karena banyaknya karyawan yang dirumahkan dan PHK besar-besaran. Akibatnya pengangguran melonjak naik sehingga laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia bernilai negatif. Setelah pandemi covid-19 pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,61%. Perkembangan ekonomi di Indonesia setelah covid-19 dapat dikatakan lebih baik daripada sebelum covid-19.

Tabel 1.1. Data Pertumbuhan Ekonomi (Persen) di Pulau Sumatera Pada Tahun 2018-2022

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	4,61	4,14	-0,37	2,79	4,21
Sumatera Utara	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73
Sumatera Barat	5,14	5,01	-1,61	3,29	4,36
Riau	2,35	2,81	-1,13	3,36	4,55
Kepulauan Riau	4,47	4,83	-3,80	3,43	5,09
Jambi	4,69	4,35	-0,51	3,69	5,13
Bengkulu	4,97	4,94	-0,02	3,27	4,31
Sumatera Selatan	6,01	5,69	-0,11	3,58	5,23
Bangka Belitung	4,45	3,32	-2,29	5,05	4,40
Lampung	5,25	5,18	-1,67	2,79	4,28

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa sebelum pandemi covid-19 pada tahun 2018 dan 2019 di Pulau Sumatera, pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuaktif, kadang mengalami peningkatan dan kadang mengalami penurunan. Saat pandemi covid-19 di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera mengalami penurunan drastis alias anjlok sehingga bernilai negatif. Setelah pandemi covid-19 di tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumbagut kembali stabil karena segala kegiatan mobilitas sudah diperbolehkan alias *new normal*.

Tabel 1.2. Data Pertumbuhan Ekonomi (Persen) di Wilayah Sumatera Bagian Utara Pada Tahun 2018-2022

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	4,61	4,14	-0,37	2,79	4,21
Sumatera Utara	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73
Sumatera Barat	5,14	5,01	-1,61	3,29	4,36
Riau	2,35	2,81	-1,13	3,36	4,55
Kepulauan Riau	4,47	4,83	-3,80	3,43	5,09

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat saat sebelum pandemi covid-19 pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumbagut ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan, yaitu di provinsi Aceh mengalami penurunan sebesar 0,47%, di provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 0,04%, di provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan sebesar 0,13%, di provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 0,46%, dan di provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sebesar 0,36%. Saat pandemi covid pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumbagut mengalami pertumbuhan negatif karena mengalami penurunan yang drastis. Dampak covid-19 terhadap ekonomi sangat luar biasa. Tak sedikit karyawan yang dirumahkan dan di-PHK dari pekerjaannya. Setelah pandemi covid-19 pada tahun 2021 dan 2022, laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumbagut kembali meningkat seperti sebelum pandemi karena akses mobilitas sudah kembali seperti biasanya alias *new normal*, yaitu di provinsi Aceh meningkat sebesar 1,42%, di provinsi Sumatera Utara meningkat sebesar 2,12%, di provinsi Sumatera Barat meningkat sebesar 1,07%, di provinsi Riau meningkat sebesar 1,19%, dan di provinsi Kepulauan Riau meningkat sebesar 1,66%. Intinya, perkembangan ekonomi di wilayah Sumbagut dapat dikatakan kuat karena mengalami peningkatan dan kembali seperti sebelum pandemi covid-19.

Perkembangan ekonomi dapat diketahui dengan melihat PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dan PDRB per kapita. Sehingga perkembangan ekonomi dapat digambarkan pada masing-masing sektor atau dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan. Semakin tinggi PDRB, maka perkembangan ekonomi semakin membaik. Kriteria utama keberhasilan pembangunan daerah adalah dalam bentuk PDRB secara sektoral (lapangan usaha) maupun per kapita.

Tabel 1.3. Data PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) di Indonesia Pada Tahun 2018-2022

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Nilai PDB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.307.253.00	1.354.399.10	1.378.398.90	1.404.190.90	1.435.853.30
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1.005.655.00	1.038.902.90	1.061.087.30	1.072.977.70	1.097.952.30
a. Tanaman Pangan	298.027.30	292.883.00	303.453.70	299.203.30	299.436.60
b. Tanaman Hortikultura	145.131.20	153.157.80	159.539.30	160.385.30	167.155.10
c. Tanaman Perkebunan	387.496.70	405.147.50	410.570.40	425.042.60	432.011.50
d. Peternakan	155.539.90	167.637.90	167.116.40	167.647.30	178.100.60
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	19.459.90	20.076.70	20.407.50	20.699.20	21.248.50
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	62.981.80	63.217.60	63.199.30	63.246.60	62.448.60
3. Perikanan	238.616.20	252.278.60	254.112.30	267.966.60	275.452.40
B. Pertambangan dan Penggalian	796.505.00	806.206.20	790.475.20	822.099.50	858.146.60
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	298.420.10	289.980.10	272.583.20	260.546.10	247985.80
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	235.561.40	259.598.50	245.498.60	261.709.80	282.943.80
3. Pertambangan Bijih Logam	103.719.40	88.003.40	105.829.40	129.999.60	153.412.80
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	15.8804.10	168.624.20	166.564.00	169.844.00	173.804.20
C. Industri Pengolahan	2.193.368.40	2.276.667.80	2.209.920.30	2.284.821.70	2.396.603.00
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	219.831.80	217.402.20	202.603.70	203.766.90	211.339.80
Industri Pengolahan Non Migas	1.973.536.60	2.059.265.60	2.007.316.60	2.081.054.80	2.185.263.20
1. Industri Makanan dan Minuman	690.462.50	744.170.50	755.914.90	775.098.40	813.062.40
2. Industri Pengolahan	87.548.70	90.486.70	85.257.50	84.133.30	82.167.70

Tembakau					
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	126.406.80	145.804.60	132.851.00	127.429.10	139.326.50
4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	28.941.70	28.654.10	26.142.60	28.169.30	30.805.00
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	62.337.30	59.498.30	58.212.10	56.050.90	56.381.80
6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	73.681.60	80.211.00	80.385.30	78.061.20	80.974.50
7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	179.791.90	195.040.90	213.360.50	233.866.00	235.475.30
8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	76.627.80	72.398.80	68.337.70	69.072.80	66.242.60
9. Industri Barang Galian bukan Logam	71.424.40	70.690.70	64.239.20	64.812.00	63.514.70
10. Industri Logam Dasar	891.88.60	91.716.90	97.099.50	108.267.30	124289.70
11. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	205.216.80	204.172.50	193.026.60	189.890.00	202.637.90
12. Industri Mesin dan Perlengkapan	342.97.30	32.881.00	29.536.40	32.911.10	36.652.30
13. Industri Alat Angkutan	205.907.20	198.853.90	159359.00	187.750.70	207.792.80
14. Industri Furnitur	25.946.00	28.113.00	271.67.50	29.385.70	28.800.70
15. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	15.758.00	16.572.70	16.426.80	16.157.00	17.139.30
D. Pengadaan Listrik dan Gas	107.108.60	111.436.70	108.826.40	114.861.10	122.451.90

1.Ketenagalistrikan	93.318.00	97.623.80	96.663.10	1020.83.90	109.290.20
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	13.790.60	13.812.90	12.163.30	12.777.20	13.161.70
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.429.40	9.004.90	9.449.30	9.919.30	10.240.10
F. Konstruksi	1.048.082.80	1.108.425.00	1.072.334.80	1.102.517.70	1.124.725.20
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.376.878.70	1.440.185.70	1.385.651.20	1.449.831.40	1.529.885.60
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	262.578.50	272.349.70	233.920.30	262.292.90	277.746.10
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1.114.300.20	1.1678.36.00	1.151.730.90	1.187.538.50	1.252.139.50
H.Transportasi dan Pergudangan	435.336.50	463.125.90	393.418.90	406.169.30	486.874.90
1. Angkutan Rel	4.020.00	4.200.30	2.422.00	2.340.40	3.973.90
2. Angkutan Darat	238.457.70	262.208.10	248.208.00	259.493.20	282.147.80
3. Angkutan Laut	34.276.40	37.865.40	361.34.20	37.177.00	39.080.00
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	11.566.50	12.212.20	10.624.60	10.580.00	17.979.50
5. Angkutan Udara	77.493.40	69.926.90	32.826.90	30.198.90	50.402.80
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	695.22.50	76.713.00	63.203.20	66379.80	93.290.90
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	315.068.60	333.304.60	299.122.40	310.748.60	347.943.80
1. Penyediaan Akomodasi	62.997.30	6.3867.40	48.227.90	51.021.00	66.835.80
2. Penyediaan Makan Minum	252.071.30	269.437.20	250.894.50	259.727.60	281.108.00
J. Informasi dan Komunikasi	538.762.70	589.536.10	652.062.90	696.506.10	750.389.20
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	415.620.60	44.3093.10	457.486.50	464.637.70	473.615.00
1. Jasa Perantara Keuangan	251.912.30	267.387.00	278.028.30	285.571.60	292.549.70

2. Asuransi dan Dana Pensiun	93.169.90	98.453.60	102.419.00	103.146.30	102.137.00
3. Jasa Keuangan Lainnya	61.371.00	67894.70	67.507.60	65.894.20	68.839.10
4. Jasa Penunjang Keuangan	9.167.40	9.357.80	9.531.60	10.025.60	10.089.20
L. Real Estate	299.648.20	316.901.10	324.259.40	333.282.90	339.014.90
M,N. Jasa Perusahaan	187.691.10	206.936.20	195.671.10	197.106.70	214.399.00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	349.277.60	365.538.80	365.446.00	364.251.40	373.439.10
P. Jasa Pendidikan	321.133.80	341.349.90	35.0272.80	350.662.60	352.716.20
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.173.22.20	127.487.90	142.227.30	157.085.30	161.384.90
R,S,T,U. Jasa lainnya	185.405.60	205.011.40	196.608.90	200.773.20	219.777.80
PRODUK DOMESTIK BRUTO	10.425.851.9	10.949.155.4	10.722.999.3	11.120.077.9	11.710.397.8

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas, PDB di Indonesia sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2018 dan 2019, dapat dilihat bahwa PDB Indonesia meningkat sebesar 523.303,50 juta rupiah. Pada tahun 2020, nilai PDB Indonesia menurun sebesar 226.156,10 disebabkan oleh covid-19. Tak sedikit karyawan yang dirumahkan. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai PDB di Indonesia kembali meningkat karena diberlakukannya aktivitas *new normal* sehingga mobilitas juga berjalan kembali seperti sediakala dan nilai PDB di Indonesia kembali stabil yaitu meningkat sebesar 590.419,9 juta rupiah.

Tabel 1.4. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) di Pulau Sumatera Pada Tahun 2018-2022

Provinsi	Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	126.824,37	132.069,62	131.580,97	135.251,19	140.947,64
Sumatera Utara	512.762,63	539.513,85	533.746,36	547.651,82	573.528,77
Sumatera Barat	163.996,19	172.205,57	169.426,61	175.000,50	182.629,54
Riau	482.064,63	495.607,05	489.995,75	506.471,91	529.532,98
Kepulauan Riau	173.498,75	181.877,67	174.959,21	180.952,44	190.163,70
Jambi	298.484,07	315.464,75	315.129,22	326.411,27	343.483,65
Bengkulu	173.498,75	181.877,67	174.959,21	180.952,44	190.163,70
Sumatera Selatan	44.164,11	46.345,45	46.338,43	47.853,78	49.916,06
Bangka Belitung	52.208,04	53.941,90	52.705,94	55.369,65	57.803,20

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas, data PDRB di Pulau Sumatera sebelum pandemi covid-19 (dari tahun 2018 ke 2019), meningkat. Namun pada tahun 2020, nilai PDRB di Pulau Sumatera menurun karena dilanda oleh pandemi covid-19. Terjadi PHK besar-besaran dan tak sedikit karyawan yang dirumahkan sehingga nilai PDRB di Pulau Sumatera menurun. Setelah pandemi covid-19 (pada tahun 2021 dan 2022), nilai PDRB di Pulau Sumatera kembali merangkak naik dan meningkat lebih baik daripada sebelumnya karena kegiatan *new normal* sudah diberlakukan sehingga kegiatan mobilitas dapat berjalan seperti sediakala.

Tabel 1.5. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) di Wilayah Sumatera Bagian Utara Pada Tahun 2018-2022

Provinsi	Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	126.824,37	132.069,62	131.580,97	135.251,19	140.947,64
Sumatera Utara	512.762,63	539.513,85	533.746,36	547.651,82	573.528,77
Sumatera Barat	163.996,19	172.205,57	169.426,61	175.000,50	182.629,54
Riau	482.064,63	495.607,05	489.995,75	506.471,91	529.532,98
Kepulauan Riau	173.498,75	181.877,67	174.959,21	180.952,44	190.163,70

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas, PDRB di wilayah Sumbagut pada tahun 2018 dan 2019 (sebelum covid-19) mengalami penurunan kecuali di provinsi Riau. PDRB di provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 8.209,38 milyar rupiah. Pada tahun 2020, PDRB di wilayah Sumbagut mengalami penurunan imbas dari covid-19. Pada tahun 2021 ke 2022, PDRB di wilayah Sumbagut kembali mengalami peningkatan bahkan lebih tinggi daripada sebelum covid-19. Kenaikan nilai PDRB menunjukkan perekonomian di wilayah Sumbagut menuju ke arah yang lebih baik.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapat beberapa permasalahan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Pada tahun 2018 dan 2019, PDRB di wilayah Sumatera Bagian Utara mengalami penurunan yaitu di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
2. Pada tahun 2020, perkembangan ekonomi mengalami penurunan pada masa covid-19
3. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas apakah perkembangan ekonomi pasca covid-19 lebih baik daripada sebelum covid-19 di wilayah Sumbagut. Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan untuk mempermudah dalam pemecahan masalah serta untuk menghindari luasnya pokok pembahasan. Jadi, pada penelitian ini dibatasi hanya pada perkembangan ekonomi pasca covid-19 di wilayah Sumatera Bagian Utara pada tahun 2020-2022

1.4. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan indikator ekonomi dan sosial pasca covid-19 di wilayah Sumatera Bagian Utara pada tahun 2020-2022?
2. Sektor apa saja yang mendominasi di lima provinsi wilayah Sumatera Bagian Utara pasca covid-19?

1.4.2. Tujuan Penelitian

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan sosial ekonomi pasca covid-19 di lima provinsi wilayah Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) selama periode tahun 2020-2022 tentang indikator ekonomi (nilai PDRB, nilai PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan gini ratio) dan sosial (IPM dan kemiskinan) di wilayah Sumatera Bagian Utara (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau).
2. Melakukan analisa ekonomi untuk sektor yang mendominasi di lima provinsi wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) pada tahun 2020-2022, melakukan perhitungan kontribusi sektoral PDRB di provinsi wilayah Sumatera Bagian Utara (17 sektor) dan pertumbuhan.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Akademik

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Agar dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan juga sebagai saran untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori sudah diperoleh di bangku kuliah.
3. Sebagai tambahan pembelajaran mahasiswa mengenai pembahasan terkait.

1.5.2. Manfaat Non Akademik

1. Bagi pemerintah wilayah Sumbagut, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi atau informasi untuk dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan yang tepat guna meningkatkan perkembangan ekonomi.
2. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna sebagai salah satu informasi mengenai masalah perkembangan ekonomi.

Berdasarkan pada seluruh uraian tersebut, maka akan dilakukan penelitian berjudul **“Analisa Perkembangan Ekonomi Pasca Covid-19 di Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) pada Tahun 2020-2022”**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu indikator penting dalam menganalisis keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Tercapai tidaknya program-program pembangunan di suatu negara acap kali diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan *output* dan pendapatan nasionalnya. Menurut Simon Kuznets (1955), pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kemampuan suatu negara menyediakan jenis barang-barang ekonomi dalam jangka panjang kepada penduduknya. Kemampuan tersebut mampu tumbuh sejalan dengan perkembangan teknologi, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta ideologis yang dibutuhkan (Jhingan, 2012).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara. "pertumbuhan" (*growth*) tidak identik dengan "pembangunan" (*development*). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan (Kamarudin, 2010).

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara terus menerus maka dimungkinkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan ekonomi disuatu negara atau daerah, menunjukkan besar kecilnya ekonomi dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tercipta

dilihat dari peran pemerintah yang sangat berpengaruh, hal ini sebab peran swasta belum cukup berpengaruh dalam hal pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari GNP. (Sukirno, 2012)

Menurut Todaro & Smith (2006), pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah peningkatan hasil atau *output* masyarakat yang disebabkan oleh, semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat. Tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi setiap bangsa, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Akumulasi Modal (*capital accumulation*), meliputi dari semua bentuk investasi atau investasi baru dengan tujuan untuk meningkatkan *output* dan modal manusia atau sumber daya manusia (*human capital*) untuk peningkatan produktivitas sumber daya alam (tanah) melalui investasi strategis.

2) Akumulasi Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja, dimana pertumbuhan penduduk yang berkembang berarti ukuran pasar domestiknya juga akan besar sedangkan dengan berkembangnya jumlah tenaga kerja maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang produktif.

3) Akumulasi Kemajuan Teknologi (*technology progress*), merupakan sumber utama di dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam pengertian yang sederhana kemajuan teknologi karena adanya penemuan baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada tiga klasifikasi kemajuan teknologi diantaranya yaitu : kemajuan teknologi yang netral (*neutral technology progress*), kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (*laborsaving technological progress*), dan kemajuan teknologi hemat modal (*capital-saving technological progress*).

A. Pertumbuhan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Adam Smith dalam bukunya “*An Inquiry into the nature and Causes of Wealth of the Nation*” mengemukakan faktor – faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Jadi menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpacuan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000).

Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain :

a. Pertumbuhan output total Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Adam Smith ada tiga, yaitu :

1) Sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi tanah)

Menurut Adam Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu negara. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

2) Sumber daya insani (jumlah penduduk)

Sumber daya insani mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.

3) Stok barang modal

Stok modal merupakan unsur produktif yang secara aktif menentukan pertumbuhan output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai batas maksimal dari sumber daya alam).

b. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsistem maka orang-orang akan menikah pada usia muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran akan meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat subsistem maka jumlah penduduk akan menurun.

2. David Ricardo

David Ricardo mengkritik pemikiran dari Adam Smith yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Ricardo pertumbuhan penduduk yang terlalu bahkan hingga dua kali lipat akan mengakibatkan jumlah tenaga kerja yang melimpah. Tenaga kerja yang jumlahnya melimpah dapat menyebabkan

menurunnya upah yang diterima, bahkan upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum. Bila hal ini terjadi maka, perekonomian akan mengalami stagnasi atau kemandekan yang dikenal dengan istilah *stationary state*. Teori David Ricardo ini terkenal dengan *Law Of Diminishing Return*, Ricardo mengungkapkan bahwa keterbatasan produksi tanah yang bersifat tetap sehingga akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo dalam Sukirno (2010), yaitu:

a. Pada mulanya jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam masih melimpah sehingga para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Pembentukan modal tergantung pada keuntungan, maka laba yang tinggi tersebut akan diikuti dengan pembentukan modal yang tinggi pula. Maka pada tahap ini akan terjadi kenaikan produksi dan peningkatan permintaan kerja.

b. Tahap kedua jumlah tenaga kerja diperkejakan bertambah, maka upah akan naik dan kenaikan upah tersebut akan mendorong pertambahan penduduk. Karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan mutunya akan semakin rendah, akibatnya setiap tambahan hasil yang diciptakan oleh masing-masing pekerja akan semakin berkurang. Semakin terbatasnya jumlah tanah yang dibutuhkan, maka harga sewa tanah akan semakin tinggi. Hal tersebut akan mengganggu keuntungan pengusaha yang menyebabkan pengusaha tersebut mengurangi pembentukan modal dan menurunkan permintaan tenaga kerja yang berakibatkan turunnya tingkat upah.

c. Tahap selanjutnya ditandai menurunnya tingkat upah dan pada akhirnya akan berada pada tingkat minimal. Pada tingkat ini, pembentukan modal baru tidak akan terjadi lagi karena sewa tanah yang sangat tinggi menyebabkan pengusaha tidak memperoleh keuntungan.

3. Teori T.R. Malthus

Dalam pandangan mazhab klasik mengenai perkembangan ekonomi secara umum, nampak adanya pengaruh dari gagasan Malthus tentang signifikan masalah pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan ekonomi. Dengan demikian maka hal ini perlu diperhatikan karena masalah penduduk mempunyai arti dan relevansi terhadap perkembangan ekonomi. Menurut Malthus, secara alamiah populasi akan terus mengalami peningkatan lebih cepat daripada suplai makanan. Produksi makanan per kapita tentu saja akan mengalami penurunan, sementara populasi mengalami kenaikan. Malthus membeberkan sejumlah faktor kendala terhadap kelangsungan pertumbuhan, seperti bertambahnya jumlah penduduk secara kuantitatif sekali-kali tidak menjadi jaminan bahwa pendapatan riilnya akan meningkat dengan sepadan. Pertambahan penduduk hanya mendukung pertumbuhan terhadap tata susunan ekonomi, apabila perkembangan ekonomi dapat meningkatkan daya beli real (permintaan efektif) masyarakat secara menyeluruh. Barulah, dalam keadaan yang demikian akan terlaksana akumulasi modal sebagai ciri pokok dalam proses pertumbuhan, sekaligus juga akan menimbulkan permintaan tenaga kerja. Kendala terhadap perkembangan tersebut oleh Malthus diungkapkan dalam teorinya mengenai ketidakmampuan untuk berkonsumsi secara memadai (*Theory of underconsumption*) (Boediono, 2009).

Masalah penting dalam pembahasan Malthus yang menarik perhatian dan sampai sekarang masing relevan bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang ialah segi intuisi yang bersifat sosiologis-ekonomis. Dalam masyarakat di negara-negara maju, termasuk di kalangan cendekiawan, sering terdapat pandangan seolah-olah keterbelakangan dan kemacetan ekonomi di belahan dunia lain (Amerika Latin, Afrika, Asia) disebabkan oleh tabiat dan perilaku

penduduk setempat, yaitu sikap memudahkan sesuatu, malas dan mempunyai ketergantungan pada alam yang sangat menguntungkan dan memudahkan kehidupan manusia (Boediono, 2009).

Pandangan yang dangkal tetapi populer itu kebenarannya dibantah oleh Malthus. Malthus menunjukkan kepada kenyataan institusional dalam tata susunan ekonomi masyarakat yang menjadi kendala besar bagi kemajuan ekonomi rakyat. Keterbelakangan dan kemiskinan penduduk di negara-negara yang dimaksud bukanlah disebabkan oleh terbatasnya tanah subur atau semakin kecilnya luas tanah karena penduduk bertambah, bukan pula oleh “kemalasan” penduduk. Kemiskinan itu ada sangku-pautnya pada kenyataan bahwa tanah yang sangat luas dikuasai oleh segelintir kalangan atas dalam masyarakat yang terdiri dari sejumlah keluarga tuan tanah. Konsentrasi kepemilikan dan penguasaan tanah serupa itu tidak memberikan dorongan dan sama sekali tidak mengandung perangsang bagi petani penggarap tanah untuk mencari kemajuan dengan cara meningkatkan hasil produksinya, apalagi dengan cara melakukan investasi. Hal ini dikarenakan sebagian besar hasil produksi tanah dinikmati oleh tuan tanah, sedangkan hasil produksi masyarakat kecil (golongan lemah) lebih diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan hanya sebagian kecil yang di investasikan (Boediono, 2009).

4. Teori Karl Max

Pola pendekatan dinamika (*pattern of dynamic approach*) yang menyangkut perkembangan masyarakat secara menyeluruh dalam jangka panjang, bukanlah cara pandang yang baru timbul di zaman modern. Haluan pemikiran tersebut telah terkandung dalam gagasan-gagasan para takar teori klasik. Pola pendekatan demikian lebih menonjol lagi dalam pemikiran Karl Max, yang dapat dianggap sebagai teori dinamika yang paling komprehensif. Dalam hubungan itu, pandangan para pakar teori klasik dan Karl Marx dapat dimasukkan dalam kategori *grand theories* dan kadang-kadang sebagai *magnificent dynamics*. Karl Marx

menyoroti banyak aspek dalam teorinya yang terkenal sebagai teori konflik. Dalam perspektif pertumbuhan ekonomi, Marx menonjolkan pendeskripsian tentang perkembangan masyarakat dari polanya yang sederhana hingga menjadi masyarakat yang berstruktur kompleks dan dengan pembagian kerja yang ketat dalam masyarakat kapitalis. Dalam gagasannya mengenai konsep materialisme historis, Marx mengungkapkan bahwa aktivitas produktif manusia merupakan kunci untuk menganalisis kehidupan manusia. Hal inilah yang menjadi substansi masyarakat kapitalis, yaitu bahwa seluruh masyarakat harus membuat diri mereka produktif dari tahun ke tahun. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat terikat dalam produksi yang bersifat materi. Para kapitalis merupakan pihak yang memiliki posisi tawar tertinggi, sedangkan kaum buruh hanya dapat menjual tenaganya kepada majikan sebagai satu input dalam proses produksi. Maka, terjadilah eksploitasi besar-besaran terhadap kaum buruh. Sejalan dengan perkembangan teknologi, para pengusaha yang menguasai faktor produksi akan berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan menginvestasikan akumulasi modal yang diperolehnya. Menurut Marx, kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari produktivitas buruh yang dipekerjakannya. Nilai buruh yang dinyatakan dalam bentuk upah merupakan manifestasi dari jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh tersebut (Boediono, 2009).

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Teori ini dikemukakan oleh seorang ekonom Inggris bernama John Maynard Keynes. Teori ekonominya didasarkan pada hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia

membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh. Keynes menawarkan solusi atas hambatan perekonomian ini yaitu dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan supply uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. (Mankiw, 2006).

C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Pertumbuhan neoklasik menjelaskan tentang output homogen tunggal yang diproduksi oleh dua jenis input, yaitu modal dan tenaga kerja. Unsur-unsur baru dari model pertumbuhan neoklasik adalah modal dan perubahan teknologi (Samuelson dan Nordhaus, 2004). Dalam hal ini teknologi dianggap tetap dan modal adalah barang-barang yang diproduksi dengan daya tahan lama untuk digunakan membuat barang-barang baru. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik mengacu pada kerangka analisis pertumbuhan ekonomi menurut pandangan klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori ini adalah Robert Solow dan Trevor Swan (Arsyad, 2016). Menurut teori Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal serta kemajuan teknologi. Model neoklasik Solow Swan secara umum berbentuk fungsi produksi, yang bisa menampung berbagai kemungkinan substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L). Menurut teori ini rasio modal-output dapat berubah-ubah. Dengan kata lain, untuk menghasilkan sejumlah output tertentu dapat digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbedabeda. Jika lebih

banyak modal yang digunakan tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit dan sebaliknya. Dengan adanya fleksibilitas ini, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menentukan kombinasi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) yang akan digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Model Solow-Swan selalu mengasumsikan hubungan antara modal dan tenaga kerja serta output barang dan jasa. Namun model ini bisa dimodifikasi untuk memasukkan kemajuan teknologi yang merupakan variabel eksogen. Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi, ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat (Mankiw, 2006).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut (Sukirno,2002) :

1. Faktor sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

2. Faktor sumber daya alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

3. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas. Serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Faktor budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan.

5. Faktor sumber daya modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas

Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Kuncoro (2006) dalam buku yang berjudul “Ekonomika Pembangunan” yaitu :

1) Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) mempresentasikan pendapatan nasional dengan menghitung keseluruhan *output* barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara. Di mana hal ini mencakup semua produksi ekonomi yang dilakukan oleh warga

negaranya maupun warga negara asing, selama masih berada di wilayah atau teritorialnya. Untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi negara bergerak ke arah yang lebih baik, maka Anda tinggal membandingkannya periode tertentu dengan periode sebelumnya. Apabila nilai PDB naik, maka pertumbuhan ekonomi negara pun bergerak naik.

2) Pendapatan Per Kapita

Indikator pertumbuhan ekonomi berikutnya adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sendiri adalah pendapatan rata-rata penduduk di sebuah negara atau sering juga disebut sebagai standar untuk melihat kemakmuran suatu negara. Ketika pendapatan masyarakat di suatu negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut dianggap sedang meningkat.

3) Kesejahteraan Penduduk

Kesejahteraan penduduk memiliki hubungan dengan pendapatan riil per kapita, tepatnya dalam hal distribusi barang dan jasa. Ketika barang dan jasa yang diproduksi suatu negara semakin banyak, maka proses distribusinya juga harus merata. Hal ini akan berpengaruh pada pendapatan per kapita yang juga merata ke seluruh wilayah. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan sudah bisa dipastikan terlaksana.

4) Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi negara yang membaik juga diwujudkan dari ketersediaan kesempatan atau lapangan kerja. Di mana penyerapan jumlah tenaga kerja akan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan begitu, produktivitas negara pun ikut meningkat.

2.1.2. Teori Pendapatan Nasional

Menurut George Mankiw (2003) Produk Domestik Regional Bruto adalah pendapatan total yang di peroleh secara domestik, termasuk pendapatan yang diperoleh faktor-faktor produksi yang dimiliki asing, pengeluaran total atas barang dan jasa yang diproduksi secara domestik. Atau adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang di produksi dalam perekonomian dalam kurun waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi disuatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut atautakah milik penduduk wilayah lain. Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah Hasil penghitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian, pertama PDRB berdasarkan harga berlaku (nominal) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Kedua yaitu PDRB berdasarkan harga konstan (riil) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. (Sadono Sukirno, 2005)

A. Metode Penghitungan PDRB

Menurut Sukirno (2002), cara menghitung PDRB dapat diperoleh dengan tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi didalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penajiannya dikelompokkan menjadi

- 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- 2). Pertambangan dan Penggalian;
- 3). Industri Pengolahan;
- 4).Pengadaan Listrik, Gas
- 5).Pengadaan Air
- 6).Konstruksi
- 7). Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- 8). Transportasi dan Pergudangan;
- 9). Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- 10). Informasi dan Komunikasi
- 11). Jasa Keuangan
- 12). Real Estate
- 13). Jasa Perusahaan
- 14). Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
- 15).Jasa Pendidikan
- 16). Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

17). Jasa Lainnya.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB dihitung berdasarkan semua komponen permintaan akhir yang terdiri: pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi swasta dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor).

B. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah atau daerah. Karena keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memobilisasi sumberdaya yang terbatas sehingga mampu melakukan perubahan struktural yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi yang seimbang. PDRB Per Kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB Per Kapita didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Per Kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah (Boediono, 1999).

PDRB Per Kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek

pemerataan pendapatan di daerah. Dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di suatu wilayah maka akan diperoleh angka PDRB Per Kapita (Todaro & Smith, 2015). Pendapatan perkapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indikator kesejahteraan negara, standar pertumbuhan kemakmuran negara, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembandingan tingkat kemakmuran antarnegara. (Adji, Wahyu, dkk, 2007). Berikut penjelasan tiap-tiap manfaat pendapatan per kapita adalah :

a) Indikator kesejahteraan negara merupakan ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu negara. Ini disebabkan karena pendapatan perkapita telah mencakup jumlah penduduk sehingga secara langsung dapat menunjukkan tingkat kemakmuran.

b) Standar pertumbuhan kemakmuran negara. Pendapatan per kapita merupakan standar umum untuk membandingkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara dari tahun ke tahun.

c) Sebagai permodalan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi. Pendapatan per kapita dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi karena pemerintah dapat memantau pertumbuhan ekonomi yang ada dalam masyarakat.

d) Pembandingan tingkat kemakmuran antarnegara. Pendapatan per kapita juga umum digunakan sebagai pembandingan tingkat kemakmuran antara negara yang satu dengan yang lainnya. Dengan menetapkan standar per kapita, maka negara-negara didunia dapat dikelompokkan kedalam negara berpendapatan rendah, menengah, atau tinggi.

2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

UNDP (*United Nation Development Programme*) merumuskan “pembangunan manusia suatu proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk”. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mewujudkan tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, berkesinambungan, pemberdayaan (Muqorrobin, 2017). Indeks pembangunan manusia yakni indikator kesejahteraan manusia dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indeks pembangunan manusia merupakan akumulasi dari tingkat pendidikan, kesejahteraan dan kelayakan hidup.

Indeks pembangunan manusia juga berperan dalam pembangunan perekonomian karena pembangunan manusia yang baik ingin menjadikan faktor-faktor Produksi. Aspek produksi yakni tercapainya tingkatan pembelajaran yang lumayan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian, setelah itu dengan tercapainya tingkatan pembelajaran, maka peluang mempunyai keahlian dalam mengelola sumber energi yang ada, sehingga sumber energi yang ada bisa dikelola untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) ialah sesuatu proses dalam jangka panjang serta bermacam aspek sosial ekonomi ikut andil di dalamnya. Proses pembangunan SDM ini ialah interaksi bermakna komponen yang terjadi secara bertahap dari masa tradisional, masa pertumbuhan, hingga masa modern, alasan yang melandasi dibuatnya indeks ini yakni mencermati mutu sumber energi manusia. Pembangunan manusia yaitu sesuatu proses untuk memperbesar pilihan untuk manusia, dari definisi ini bisa diambil kesimpulan bahwa inti pembangunan suatu negara merupakan manusia sebagai peninggalan negara yang sangat

berharga. Definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya meliputi ukuran pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang cuma mengutamakan pada perkembangan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan sepatutnya di analisis dan dipahami dari sisi manusia, bukan cuma dari sisi perkembangan ekonominya.

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan sebaiknya di analisis serta jelas dari sisi manusia, bukan cuma dari sisi perkembangan ekonominya saja. Dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pembangunan mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan bertujuan dibuat untuk memperbesar pilihan bagi penduduk, bukan cuma untuk meningkatkan pemasukan mereka. Oleh sebab itu, konsep pembangunan manusia wajib berpusat pada penduduk secara komprehensif serta bukan cuma aspek ekonomi semata.
3. Pembangunan manusia mengamati bukan cuma pada upaya tahapan kapasitas manusia, namun juga pada upaya menggunakan kapasitas manusia tersebut secara maksimal.
4. Pembangunan manusia didukung 4 pilar pokok, yakni produktivitas, pemerataan, berkesinambungan serta pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar untuk menentukan tujuan pembangunan serta dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk pencapaiannya. Berawal dari konsep diatas, penduduk yaitu tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai fasilitas untuk memperoleh tujuan tersebut.

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan manusia terdapat 4 perihal pokok yang dicermati ialah:

1. Produktivitas Penduduk wajib meningkatkan produktivitas serta partisipasi penuh dalam proses penciptaan pemasukan serta nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi yakni bagian dari modal pembangunan manusia
2. Pemerataan Penduduk mempunyai peluang yang sama yakni memperoleh akses terhadap sumber energi ekonomi serta sosial. Seluruh hambatan yang memperkecil peluang untuk mendapatkan akses tersebut harus dihilangkan, sehingga mereka bisa mengambil khasiat dari kesempatan yang ada serta berpartisipasi dalam aktivitas produktif yang dapat meningkatkan mutu hidup.
3. Berkesinambungan Akses terhadap sumber energi ekonomi dan sosial wajib ditentukan tidak hanya untuk generasi yang akan datang. Seluruh sumber energi manusia serta area senantiasa diperbaiki.
4. Pemberdayaan Penduduk wajib berpartisipasi dalam keputusan dan proses yang memastikan arah kehidupan mereka dan untuk berpartisipasi bersama mengambil keputusan dalam proses pembangunan. Sebagai ukuran kualitas hidup, indeks pembangunan manusia dibangun melalui 3 pendekatan dimensi dasar. Dimensi yang dimaksud yakni mencakup usia panjang yang diatur dengan tingkat harapan hidup, pengetahuan yang diatur dalam rata-rata dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua per tiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga) dan penghasilan yang diatur dengan pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan.

Dengan tiga ukuran pembangunan ini dan menerapkan suatu formula yang kompleks terhadap sekitar 160 negara, maka *Human Development Indeks* nya dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Negara atas pembangunan manusia yang rendah (*Low Human Development*) bila nilai *Human Development Indeks* berkisar antara 0,0 hingga 0,50.
2. Negara atas pembangunan manusia yang menengah (*Medium Human Development*) bila nilai maka *Human Development Indeks* berkisar antara 0,51 hingga 0,79.
3. Negara atas pembangunan manusia yang tinggi (*High Human Development*) bila nilai maka *Human Development Indeks* berkisar antara 0,80 hingga 1,027. Ketiga dimensi ini memiliki pengertian besar karena terkait banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan dengan memakai angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas.

Menurut UNDP (1997), Indeks Pembangunan Manusia memiliki empat komponen, yaitu :

A. Harapan Hidup

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live births*) dan rata-rata anak yang masih hidup (*still living*) per wanita usia 15- 49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

B. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat di suatu wilayah. Didalam suatu wilayah semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin jenjang pendidikan yang dijalani. Rata lama sekolah diukur dengan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Upaya yang digunakan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah telah menjalankan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTA.

C. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan peluang anak usia 7 tahun keatas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat angka harapan hidup, rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah akan menciptakan masyarakat yang berwawasan tinggi, sehingga nantinya akan meningkatkan jumlah masyarakat yang berwawasan tinggi. Apabila jumlah masyarakat yang berwawasan tinggi. Semakin banyak nantinya capaian indeks pembangunan manusia juga akan semakin tinggi.

D. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi anggota rumah tangga pada periode tertentu. Pengeluaran per kapita secara keseluruhan bagi anggota rumah tangga yang termasuk dalam satu rumah tangga yaitu dengan memakai pengertian pengeluaran konsumsi rumah tangga. Jadi, Pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang

dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan hidup sehari-hari bagi anggota rumah tangga dalam suatu periode tertentu.

2.2. Regulasi/Kebijakan Pemerintah

A. Pemerataan Ekonomi

Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33, Pemerataan ekonomi adalah suatu upaya untuk memberikan kesempatan luas bagi warga negara memiliki pendapatan minimum, sandang, pangan dan papan seadil mungkin. Negara-negara miskin memiliki permasalahan dilematis antara fokus pada pertumbuhan atau melakukan pemerataan ekonomi. Jika berfokus menggenjot pertumbuhan, ketimpangan ekonomi sangat mungkin terus melebar mengingat akses warga yang sangat terbatas dengan kemampuan modal, sumberdaya manusia dan keterampilan yang rendah. Tetapi jika mengutamakan pemerataan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, negara-negara miskin akan sulit meningkatkan GNP dan menaikkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya memiliki peran sama penting, tapi hampir mustahil dapat dicapai bersamaan. Hal tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2) dan (3) yang berbunyi :

Pasal 33 Ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup banyak orang dikuasai oleh negara.”

Pasal 33 Ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sistem ini menekankan bahwa suatu usaha bersama berarti bahwa setiap warga Negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu, negara harus mengambil bagian aktif

dalam pengarahannya perekonomian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan nilai uang (menghindari inflasi), menjamin tingkat pengangguran yang rendah dan neraca perdagangan luar negeri yang seimbang. Artinya, perekonomian harus merata agar tidak terjadi ketimpangan/kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang merupakan usaha bersama atas dasar kekeluargaan di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta secara aktif. Keterkaitan dan kemitraan antar para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi yaitu pemerintah, badan usaha milik Negara, koperasi dan badan usaha swasta, dan sektor informal harus diusahakan demi mewujudkan pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi yang sesuai dengan sistem perekonomian Indonesia.

Berikut ini, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemerataan perekonomian, yaitu :

1. Mendorong Aktivitas Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja
2. Memperluas Akses Pasar bagi UMKM
3. Meningkatkan kapasitas SDM dan Pelaku Usaha
4. Mengurangi Beban Pengeluaran Penduduk Kurang Mampu
5. Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Dasar
6. Meningkatkan Peran Daerah dalam Mendorong Aktivitas Ekonomi Perdesaan

Pemerataan Ekonomi diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang berazaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil. 3 (tiga) pilar utama Pemerataan Ekonomi adalah Lahan, Kesempatan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Strategi Pemerataan Ekonomi pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Bappenas adalah:

- a. Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM). Deputi Bidang Ekonomi menjadi penanggung jawab tim KEM yang bertugas untuk memberikan arahan strategis dalam penyelesaian penyusunan dan pemutakhiran KEM.
- b. Penyusunan target pertumbuhan sektoral untuk digunakan acuan bagi kebijakan sektoral sebagai dasar penentuan alokasi masing-masing K/L.
- c. Penyusunan *Resource Envelope* (Ketersediaan Anggaran) berdasarkan hasil penelaahan asumsi makro yang akan digunakan untuk menyusun rencana belanja K/L.
- d. Penyusunan rekomendasi kebijakan fiskal dan moneter nasional.
- e. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor ekonomi.

Selain strategi tersebut, Arah program pemerataan Ekonomi difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; dan Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.

- b. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target ketahanan ekonomi
- c. Penyusunan rencana akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- d. Pengembangan inovasi penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing. Serta pemeratakan ekonomi.
- e. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.

B. Pengembangan Ekonomi Daerah

Menurut Bappenas, bahwa pengembangan ekonomi lokal dan daerah adalah upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal melalui peningkatan produktivitas usaha, akses yang lebih baik ke pasar, sarana, dan prasarana, modal usaha, informasi dan teknologi, serta mendorong peningkatan nilai tambah baik *on farm* atau *off farm*, untuk peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja, serta mencapai daya saing, dan peningkatan kesejahteraan. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja pengembangan ekonomi lokal dan daerah merupakan sinergi dan kerjasama lintas sektor, lintas pelaku dan lintas daerah, diperlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

Pengembangan Ekonomi Daerah dapat di definisikan sebagai proses dimana kemitraan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat dan sektor swasta yang di dirikan

untuk mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian dengan baik sebuah wilayah tertentu. Ini menekankan pengendalian lokal, dengan menggunakan potensi manusia lokal, kelembagaan dan kemampuan fisik. Pembangunan ekonomi lokal memiliki inisiatif memobilisasi pelaku, organisasi, dan sumber daya, mengembangkan lembaga baru dan sistem lokal melalui dialog dan tindakan strategis.

Sejalan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, yang telah berubah menjadi Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana peran pemerintah menjadi lebih besar untuk mengurus urusan pemerintahannya termasuk di dalamnya hal pengembangan ekonomi. Dengan adanya desentralisasi dimana pemerintah memberikan kewenangan, keleluasaan kepada tiap-tiap daerah untuk melakukan pengembangan ekonomi berdasarkan potensi daerahnya. Tanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah terletak pada peran setiap pemangku kepentingan yang ada di daerah. Dengan demikian, untuk mempercepat pelaksanaan pengembangan ekonomi daerah perlu dibangun sinergi antarpelaku pembangunan daerah.

Berikut ini, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan ekonomi daerah, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,

6. Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, serta

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Menurut Bappenas, strategi Pengembangan Ekonomi Daerah pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pengembangan ekonomi daerah.
- c. Pengawasan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor regional.

Selain strategi tersebut, arah program Pengembangan Ekonomi Daerah difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain, serta mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Agenda 6 RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan

Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin pemerataan dengan pemenuhan pelayanan dasar.
- b. Penyusunan rencana pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif berdasarkan potensi sumber daya dan keunggulan daerah, penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang, penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah, penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah serta peningkatan kapasitas keuangan daerah, peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata dan peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- c. Pengembangan inovasi pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin pemerataan.
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan wilayah.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pengurangan kesenjangan dan pemerataan wilayah.

C. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Bappenas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktulahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator tingkat pembangunan manusia yang dihitung berdasarkan perbandingan angka harapan hidup, standar hidup layak dan pendidikan.

Proses pelaksanaan program peningkatan IPM dilandasi oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024. Peraturan Menteri Nomo 11 tahun 2020 Pasal 1 menegaskan bahwa Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Bappenas, merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka menengah. RPJMN 2020-2024 merupakan tahap keempat dari tahapan RPJPN 2005-2025 yang memuat penetapan target Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Kementerian PPN/Bappenas merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional berkewajiban untuk mengawal tercapainya sasaran dan target kedua hal tersebut.

Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dapat tercapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Setiap Agenda Pembangunan memiliki sasaran, indikator dan target pembangunan sampai dengan akhir tahun 2024. Dalam melaksanakan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024 ditetapkan pula 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Major Project merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, maka Kementerian PPN/Bappenas penetapan dukungan pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam RPJMN 2020-2024 yang terdiri atas 4 (empat) pengarusutamaan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yang sekaligus menjiwai seluruh pembangunan sektor dan wilayah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Keempat pengarusutamaan tersebut adalah:

1. Pembangunan Berkelanjutan, yang menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan

pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Gender, yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Modal Sosial dan Budaya, yang dimaksudkan sebagai strategi internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.
4. Transformasi Digital, yang terus mengalami perkembangan, khususnya teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu penyesuaian dengan pembangunan nasional.

Di sisi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan terhadap pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka 27 disusunlah perencanaan pembangunan tahunan atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi atas prioritas-prioritas setiap tahunnya, termasuk pelaksanaan Major Project. Major Project dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu, Kementerian PPN/Bappenas memposisikan diri sebagai regulator dan koordinator guna tercapainya pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Disamping itu, peran Kementerian PPN/Bappenas terhadap Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden RI dijalankan melalui peran Clearing House untuk menyelaraskan perencanaan, implementasi (Renja K/L, RKA K/L, rencana sektor swasta/BUMN), dan mobilisasi berbagai sumber dan skema pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi pada siklus perencanaan pembangunan nasional.

2.3 Inflasi

A. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan salah satu dari sekian masalah ekonomi yang cukup banyak mendapat perhatian para ekonom. Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu tujuan utama dalam perekonomian yaitu memelihara tingkat harga-harga yang relatif stabil. Namun akhirakhir ini kita menghadapi masalah yang sangat sulit, oleh karena dalam aktivitas perekonomian menghadapi ketidakstabilan harga-harga. Ada dua hal yang menyebabkan ketidakstabilan harga tersebut, yaitu inflasi dan deflasi. Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum yang berkesinambungan. Syarat inflasi yaitu terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Jika hanya satu atau dua jenis barang saja yang naik, itu bukan merupakan inflasi. Kenaikan harga yang bersifat sementara, umpamanya kenaikan harga karena musiman, menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya, tidak disebut sebagai inflasi. Sedangkan deflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan turunnya tingkat harga-harga secara umum yang berkesinambungan. Konsekuensi dari deflasi secara potensial merupakan masalah serius dalam memengaruhi kesehatan ekonomi, tetapi jarang terjadi dewasa ini. Diskusi

selanjutnya tentang ketidakstabilan harga akan difokuskan kepada inflasi karena saat ini merupakan isu yang sangat relevan (M. Natsir, 2014)

Rahardja (2008), inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari definisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum dan berlangsung terus-menerus.

B. Jenis Inflasi

Menurut Putong (2002), inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dalam pengelompokan tertentu, dan pengelompokan yang akan dipakai akan sangat bergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa jenis inflasi yaitu :

a. Menurut Derajatnya

1. Inflasi Rendah (*Creeping Inflation*)

Inflasi Rendah yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam ekonomi karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa

2. Inflasi Menengah (*Gallopning Inflation*)

Inflasi Menengah yaitu inflasi yang besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, dan 30%.

3. Inflasi Tinggi (*High Inflation*)

Inflasi Tinggi yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun.

4. Inflasi Sangat Tinggi (*Hyperinflation*)

Inflasi Sangat Tinggi yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya turun sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang

b. Menurut Penyebabnya :

1. *Demand Pull Inflation*

Inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi. Akibatnya sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan banyak sementara penawaran tetap, harga akan naik. Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru

2. *Cost Push Inflation*

Inflasi ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Akibat naiknya biaya faktor produksi, dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen, yaitu langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga produknya naik karena penurunan jumlah produksi.

3. *Bottle Neck Inflation*

Inflasi ini dipicu oleh faktor penawaran (*supply*) atau faktor permintaan (*demand*). Jika dikarenakan faktor penawaran maka persoalannya adalah sekalipun kapasitas yang ada sudah terpakai tetapi permintaannya masih banyak sehingga menimbulkan inflasi. Adapun inflasi karena faktor permintaan disebabkan adanya likuiditas yang lebih banyak, baik itu berasal dari sisi keuangan (*monetary*) atau akibat tingginya ekspektasi terhadap permintaan baru.

c. Menurut Asalnya :

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Inflasi ini timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya, biasanya pemerintah melakukan kebijakan mencetak uang baru

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

Inflasi ini timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang utama (antara lain disebabkan melemahnya nilai tukar) yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi biasanya akan disertai dengan kenaikan harga-harga barang. (Putong, 2010).

C. Indikator Inflasi

Menurut Rahardja (2008), Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu, yaitu:

1. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*)

Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing barang dan jasa tersebut diberi bobot (*weight*) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)

Jika IHK melihat dari sisi konsumen, maka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen (*producer price index*). IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

3. Indeks Harga Implisit (*GDP Deflator*)

Walaupun sangat bermanfaat, IHK dan IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang sangat terbatas. Sebab, dilihat dari metode perhitungannya, kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa puluh atau mungkin ratus jenis barang jasa, di beberapa puluh kota saja. Padahal dalam kenyataannya, jenis barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat mencapai ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu jenis. Kegiatan ekonomi juga terjadi tidak hanya di beberapa kota saja, melainkan seluruh pelosok wilayah. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, ekonom menggunakan indeks harga implisit (*GDP Deflator*), disingkat IHI.

D. Dampak Inflasi

Inflasi sebenarnya mengandung dampak negatif dan positif, namun inflasi sering lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Dampak inflasi sebenarnya ada positifnya yaitu ketika dapat meningkatkan gairah produksi dan kesempatan kerja baru. Namun, di Indonesia sendiri, selama ini masalah inflasi sering banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Dampak inflasi yang dimaksud secara umum adalah :

1. Inflasi menurunkan daya beli, terutama terhadap masyarakat miskin atau masyarakat yang berpendapatan tetap atau rendah.

2. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, termasuk masyarakat menjadi tidak suka menabung, sehingga investasi tetap rendah dan pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun pendek.
3. Semakin melebarkan kesenjangan pendapatan antara si miskin dan kaya.
4. Inflasi yang tinggi menghambat investasi produktif karena tingginya ketidakpastian, sehingga mengganggu dunia usaha, karena biaya produksi menjadi lebih mahal dan memperberat daya saing dunia usaha.
5. Bagi pemerintah, inflasi sering menyulitkan, karena kebijakan pemerintah menjadi tidak efektif dan menimbulkan biaya sosial inflasi yang semakin besar, sebab masyarakat miskin yang sudah banyak akan menjadi semakin banyak. (Prasetyo, 2009)

2.4. Gini Ratio

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga dalam suatu wilayah yang dipengaruhi oleh tingkat produktivitasnya. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang terjadi jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan pendapatan yang terjadi menunjukkan bahwa pendapatan rendah dinikmati sebagian besar penduduk dan pendapatan yang besar hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai property rights (Glaeser, 2006). Todaro dan Smith (2006) menyatakan ketimpangan pendapatan yang esktrim akan menyebabkan beberapa hal diantaranya:

1. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan menyebabkan inefisiensi ekonomi.
2. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas.
3. Ketimpangan pendapatan umumnya dianggap tidak adil.

Ketimpangan pendapatan dapat diukur melalui Indeks Gini atau Gini Ratio. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang nilainya berkisar antara nol dan satu, nilai indeks gini nol (0) artinya tidak ada ketimpangan (pemerataan sempurna) sedangkan yang nilainya satu (1) artinya ketimpangan sempurna.

Menurut Todaro dan Smith (2006), ketimpangan pendapatan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi ketimpangan rendah, ketimpangan sedang dan tinggi. Ukuran ini sesuai dengan ukuran ketimpangan yang di gunakan, nilai indeks gini pada negara-negara yang tingkat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0.50 hingga 0.70, untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata nilainya antara 0.20 hingga 0.35 sedangkan nilai indeks gini sekitar 0.4 termasuk tingkat distribusi pendapatan yang relatif timpang.

A. Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Menurut Arsyad (2002), faktor penyebab ketimpangan pendapatan di negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan turunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi, dimana penerimaan pendapatan uang yang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.

4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah dan rendahnya mobilitas sosial.

5. Rendahnya mobilitas sosial.

6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi golongan kapitalis.

7. Memburuknya nilai tukar bagi mata uang negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju sebagai akibat ketidakelestarian barang-barang ekspor dari negara sedang berkembang.

8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain

B. Dampak Ketimpangan Pendapatan

Kecemburuan sosial dan kemiskinan dapat diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan, yang menempatkan orang pada risiko terbesar untuk hal-hal seperti kerusuhan sipil dan gerakan separatis. Perbedaan regional dalam pembangunan juga dapat berkontribusi pada ketimpangan. Tenaga kerja regional yang tidak efisien, upah, dan mobilitas investasi memperburuk ketimpangan regional. Perbedaan gaji juga dapat merusak pengembangan dan pemeliharaan moneter. Karena rumah tangga berpenghasilan rendah kehilangan kesempatan untuk menjaga kesehatan mereka dan mengumpulkan modal fisik dan manusia, ketimpangan yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan. Hal ini dapat mengakibatkan pembiayaan pendidikan yang tidak memadai. Anak-anak berpenghasilan tinggi menghadiri sekolah yang

lebih baik daripada anak-anak berpenghasilan rendah. Masalah pendapatan sering diringkas dengan mengatakan pendapatan yang nyata orang kaya terus naik sedangkan pendapatan riil si miskin terus turun. Hal ini menunjukkan pendapatan nyata orang kaya meningkat lebih cepat daripada orang miskin (Bruce Herrick/Charles P. Kindleberger, 1988)

2.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi pada negara negara berkembang, karena kondisi pembangunan yang masih belum stabil dan sustainable. Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu negara. Menurut Arsyad (2004), kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995), pola kemiskinan ada empat yaitu, pertama adalah *persistent poverty* yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti di jumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai

kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan.

Menurut Ravallion (2001), kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin itu umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidak berdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

A. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat kemiskinan dapat dicerminkan melalui penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Terdapat beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Menurut Arsyad (2016) ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan:

1) Tingkat konsumsi beras.

Tingkat konsumsi beras per kapita yang digunakan sebagai indikator kemiskinan. Bagi daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240kg per kapita per tahun dapat digolongkan sebagai penduduk miskin. Bagi daerah perkotaan sebesar 360 kg per kapita per tahun.

2) Tingkat pendapatan

Mengukur kemiskinan dapat pula dilakukan dengan melihat distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat dikatakan terjadinya ketimpangan pendapatan.

Todaro (2011) membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan yaitu distribusi pendapatan perseorangan dan distribusi pendapatan fungsional. Distribusi pendapatan perseorangan yang biasanya digunakan sebagai ukuran langsung untuk menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Yang perlu diperhatikan yaitu seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang tidak peduli dari mana sumber penghasilannya. Oleh karena itu, para ekonom dan ahli statistik menghitung jumlah pendapatan semua individu kemudian membagi total populasi menjadi sejumlah kelompok atau ukuran.

3) Indikator kesejahteraan rakyat

Pada salah satu publikasi PBB pada tahun 1961 yang berjudul “*International Definition and 26 Measurement of Levels of Living: An Interim Guide*” dikemukakan bahwa terdapat Sembilan komponen yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan. Kesembilan komponen tersebut meliputi kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.

4) Indeks Kemiskinan Manusia

Indikator lain untuk mengukur tingkat kemiskinan masyarakat di suatu wilayah dengan menggunakan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*). Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) terdapat tiga nilai pokok yang menentukan tingkat kemiskinan yaitu tingkat kehidupan, tingkat pendidikan dasar dan tingkat kemampuan ekonomi.

B. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan. Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 2004)

C. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara definisi jumlah pengangguran terbuka sesuai dengan konsep ILO yang tertuang dalam an ILO Manual on Concept and Methods. (Tambunan,2001).

D. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Pemikiran sosial saat ini lebih banyak memfokuskan penyebab kemiskinan pada faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang terdapat di suatu daerah. Faktor-faktor tersebut merupakan dimensi dari kesejahteraan atau kemiskinan yang selanjutnya dijadikan sebagai faktor yang menentukan besarnya penduduk miskin (Saleh, 2002).

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah diterangkan sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB per kapita merupakan konsep dari pendapatan per kapita yang diimplementasikan penjelasannya pada lingkup regional/daerah. Besarnya pendapatan per kapita di suatu daerah mencerminkan aspek pemerataan pendapatan dengan menggunakan besarnya nilai rata-rata keseluruhan pendapatan rumah tangga dalam perekonomian daerah. Pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Konsep pendapatan per kapita seperti ini dianggap masih relevan untuk menerangkan terbentuknya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat. Ini berarti kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok di daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah. Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk

meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.

3. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja. Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

4. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Air Bersih (RPA)

Air bersih atau air minum merupakan salah satu sarana publik yang cukup vital, sehubungan dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik individu maupun keluarga. Akses terhadap air bersih atau air minum akan menentukan kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan atas makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses atas air bersih, maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. (Saleh, 2002).

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

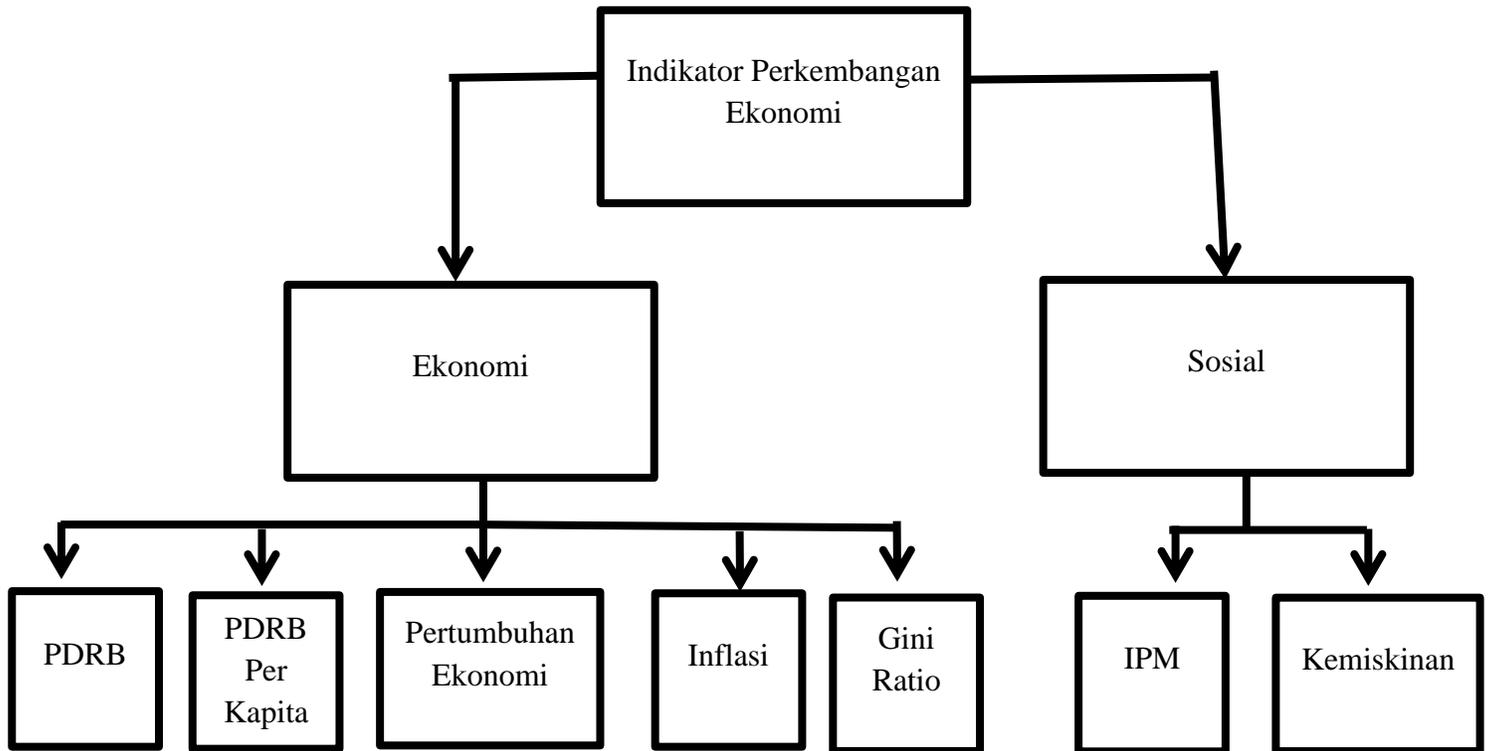
Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
Lili Nurkhamidah, 2020	PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013-2019)	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat yang dikonversi menjadi data yang berbentuk angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan dari tahun 2013-2019. Sehingga upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi terus dilakukan pemerintah guna meningkatkan kualitas pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. 2. Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2013-2019 mengalami naik turun atau fluktuatif, oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk mengurangi kemiskinan agar dapat meningkatkan pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. 3. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mampu memberikan pengaruh terhadap pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Mutia Sari, 2019	PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN INDEKS RASIO GINI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH	.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ekplanasi dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif sendiri bertujuan untuk menjelaskan memberi ringkasan berbagai kondisi berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dan uji Goodness of Fit terpilih model yang terbaik yaitu Random Effect Model. Dari hasil uji signifikansi parameter individu (Uji t) menunjukkan bahwa secara parsial variable X1 (indeks pembangunan manusia) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Begitu juga dengan variable X2 (indeks rasio gini) mempunyai pengaruh yang signifikan pula terhadap pertumbuhan ekonomi. 3. Dari

		<p>masyarakat untuk menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variable X1 (indeks pembangunan manusia) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan begitu juga dengan variable X2 (indeks rasio gini) mempunyai pengaruh yang signifikan pula terhadap pertumbuhan ekonomi</p>	<p>hasil uji signifikansi simultan (Uji f) pada menyatakan bahwa secara simultan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen yaitu indeks pembangunan manusia dan indeks rasio gini terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi.</p>
<p>Axel J. Lala , Amran T. Naukoko, Hanly F. Dj. Siwu</p>	<p>ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN (STUDI PADA KOTA – KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA)</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel tingkat ketimpangan pendapatan sebagai variabel terikat dengan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel bebas. Tempat penelitian ini adalah di Kota</p>	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hanya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang memberikan pengaruh nyata terhadap indeks gini. Dilihat dari arah pengaruhnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi menurunkan indeks gini sedangkan penambahan jumlah penduduk meningkatkan indeks gini di Provinsi Sulawesi Utara.</p>

		Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung dan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara dengan periode penelitian yaitu dari tahun 2011-2021.	
Amir Salim, Fadilla, Anggun Purnamasari, 2021	Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Dilihat dari waktu pengumpulannya, maka jenis data pada penelitian ini menggunakan data time series yang diambil dalam periode 2016 – 2020 dengan alat bantu penelitian menggunakan SPSS. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehinggalah sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific m karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi mempunyai nilai thitung 3,532 > ttabel 2,306 dengan tingkat signifikan 0,039 < 0,05, yang artinya Inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia/Produk Domestik Bruto (PDB).

		<p>konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik</p>	
<p>Sri Mahendra Satria Wirawan, 2018</p>	<p>PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI DAN RASIO GINI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI DKI JAKARTA</p>	<p>Penelitian ini dilakukan di Jakarta pada bulan Januari - Maret 2018 dengan menggunakan data sekunder Jakarta Dalam Angka Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2016, menggunakan analisis regresi linier berganda</p>	<p>Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan negatif variabel laju pertumbuhan PDRB secara individu terhadap variabel tingkat kemiskinan, terdapat pengaruh signifikan dan positif variabel tingkat pengangguran secara individu terhadap variabel tingkat kemiskinan, terdapat pengaruh signifikan dan negatif variabel pendidikan secara individu terhadap variabel tingkat kemiskinan, serta terdapat pengaruh signifikan dan negatif variabel kesehatan secara individu terhadap variabel tingkat kemiskinan</p>

2.6. Kerangka Konseptual



Variabel PDRB, PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Inflasi, Gini Ratio, dan Kemiskinan merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, yang dimana pertumbuhan ekonomi merupakan variabel terikat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah skripsi kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan gambaran ataupun penjelasan sebuah permasalahan dengan hasil yang dapat digeneralisasikan disebut sebagai penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif cenderung berokus pada aspek keluasan data. Oleh karena itu, hasil penelitian yang didominasi oleh data berupa angka-angka (data kuantitatif), dianggap sebagai gambaran ataupun perwakilan dari seluruh populasi.

3.2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variable yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, PDRB per Kapita, inflasi, gini ratio, Indeks Pembangunan Manusia, dan kemiskinan.

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu	www.bps.go.id
PDRB	PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun.	www.bps.go.id

PDRB per Kapita	PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu.	www.bps.go.id
Inflasi	Inflasi adalah kondisi ekonomi di mana terjadi kenaikan dari harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang.	www.bps.go.id
Gini Ratio	Gini Ratio adalah menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi.	www.bps.go.id
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup.	www.bps.go.id
Kemiskinan	Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan	www.bps.go.id

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

A. Tempat Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di BPS Indonesia.

B. Waktu Penelitian

Jangka waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini hingga tersusunnya hasil penelitian skripsi adalah selama bulan Mei hingga Agustus tahun 2023

3.4. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang di ukur dalam numerik. Pada umumnya data kuantitatif yang bersifat data nominal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori. Data dalam penelitian ini adalah

Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, PDRB per Kapita, inflasi, gini ratio, Indeks Pembangunan Manusia, dan kemiskinan.

B. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data Sekunder dalam penelitian ini diambil dari website Badan Pusat Statistik Indonesia.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah dilakukan dengan cara pengambilan data yang telah dipublikasi pada Badan Pusat Statistik Indonesia.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian, nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Proses analisis data perlu dilakukan agar tahu kevalidan data yang didapat sehingga nantinya akan memudahkan dalam proses selanjutnya.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah suatu riset kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka atau numerik (statistik). Maksudnya adalah penelitian tersebut berkaitan dengan penjabaran dengan angka-angka statistik. Dimana, data sekunder akan dikumpulkan dan disajikan menggunakan diagram, kurva atau tabel yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif ini akan menganalisis terkait perkembangan ekonomi pasca Covid-19 di wilayah Sumbagut.

a. Rumus mencari Pertumbuhan Ekonomi

$$Y = \frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1}$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi (%)

PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun Sekarang

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun Lalu

b. Rumus mencari kontribusi sektor dan subsektor lapangan usaha

$$K_s = \frac{PDRBi}{PDRBtotal} \times 100$$

Keterangan :

Ks = Kontribusi sektor dan subsektor (%)

PDRBi = *Output* sektor ke *i* (nomor sektor dan subsektor)

PDRBtotal = Total *output* PDRB

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Kondisi Geografis

Wilayah Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) terdiri dari lima provinsi, yaitu provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.



Sumber : Google

Daerah ini juga merupakan gerbang utama Indonesia bagian Barat. Adapun batas-batas wilayah Sumatera Bagian Utara adalah :

- Sebelah Utara : Laut Andaman
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Laut Cina Selatan
- Sebelah Barat : Samudera Hindia

Kondisi iklim di wilayah Sumatera Bagian Utara adalah iklim tropis. Iklim di Aceh hampir seluruhnya tropis. Pada wilayah pesisir pantai suhu udara rata-rata 26,9 °C, suhu udara maksimum mencapai 32,5 °C dan minimum 22,9 °C. Kelembaban relatif daerah ini berkisar antara 70 dan 80 persen. Antara bulan Maret sampai Agustus Aceh mengalami fase musim kemarau, kondisi ini dipengaruhi oleh massa udara benua Australia. Sementara musim hujan berlangsung antara bulan September hingga Februari yang dihasilkan dari massa udara daratan Asia dan Samudera Pasifik. Aceh memiliki curah hujan yang bervariasi berkisar antara 1.500-2.500 mm per tahun.

Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Kelembaban udara rata-rata 78%-91%, curah hujan (800-4000) mm/ tahun dan penyinaran matahari 43%. Iklim Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi, yaitu antara 22,6 °C sampai 31,5 °C. Provinsi ini juga dilalui oleh Garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman. Provinsi Riau beriklim tropis basah dengan rata rata curah hujan berkisar antara 1000-3000 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan.

Provinsi Riau beriklim tropis basah dengan rata rata curah hujan berkisar antara 1000-3000 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan wilayah Kepulauan Riau berada pada kategori Rendah hingga Sangat Tinggi berkisar antara kurang dari 50 mm hingga lebih dari 500 mm. Curah hujan tertinggi sebesar 542 mm/bulan di Pos Hujan Sedanau, Kabupaten Natuna. Curah hujan terendah 84 mm/bulan di Pos Hujan Sememal, Kabupaten Karimun. Namun akhir-akhir ini, iklim di wilayah Sumatera Bagian Utara mengalami kemarau panjang dan jarang hujan sehingga tak sedikit yang mengalami kekeringan.

Adapun luas wilayah di Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) menurut kabupaten/kota yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1. Luas Wilayah Sumatera Bagian Utara Tahun 2022

Provinsi	Luas Wilayah (km^2)	Persentase Terhadap Luas Wilayah (%)
Aceh	57.956	3,02
Sumatera Utara	72.981,23	3,81
Sumatera Barat	42.012,89	2,19
Riau	89.935,90	4,54
Kepulauan Riau	8.201,72	2,61

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas, luas wilayah yang terbesar di wilayah Sumatera Bagian Utara yang terbesar adalah di provinsi Provinsi Riau, yaitu sebesar 89,935,90 km^2 dan luas wilayah yang terkecil adalah di provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar 8.201,72 km^2 . Urutan luas wilayah di Sumatera Bagian Utara dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah Provinsi Riau, yaitu memiliki luas wilayah sebesar 89.935,90 km^2 , Provinsi Sumatera Utara memiliki luas wilayah sebesar 72.981,23 km^2 , Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah 42.012,89 km^2 , Provinsi Aceh memiliki luas wilayah 57.956 km^2 , dan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah sebesar 8.201,72 km^2 . Porsi wilayah Sumatera Barat lebih kecil daripada porsi wilayah Kepulauan Riau karena jumlah kota di provinsi Sumatera Barat lebih banyak daripada di provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 kota sedangkan provinsi Kepulauan Riau hanya memiliki 7 kota. Semakin banyak jumlah kota di wilayah tersebut, maka semakin sempit wilayah itu. Begitu juga sebaliknya.

4.1.2. Demografi

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk di Wilayah Sumatera Bagian Utara (Jiwa) pada Tahun 2022
Keterangan : L = Laki-Laki, P = Perempuan, T = Total 18.907.586

Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Persentase Penduduk (%)			Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa)			Persentase Penduduk Bekerja (%)		
	L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T
Aceh	2.715.386	2.692.469	5.407.855	7,8	7,7	15,5	1.189.000	625.000	1.814.000	6,3	3,3	9,6
Sumatera Utara	7.584.993	7.530.213	15.115.206	21,7	21,5	43,2	4.593.534	3.076.336	7.669.870	24,3	16,3	40,6
Sumatera Barat	2.841.802	2.798.827	5.640.629	8,11	8	16,11	2.581.444	2.688.164	5.269.608	13,7	14,2	27,9
Riau	3.383.451	3.230.933	6.614.384	9,7	9,23	18,93	2.033.333	1.115.614	3.148.947	10,8	6	16,8
Kepulauan Riau	1.112.152	1.067.668	2.179.820	3,20	3,06	6,26	663.423	341.738	1.005.161	3,5	1,6	5,1

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas, selisih penduduk laki-laki dan perempuan di provinsi Aceh adalah 22.917 jiwa, dan selisih persentase penduduk laki-laki dan perempuan adalah 0,1%. Selisih penduduk bekerja laki-laki dan perempuan adalah 564.000 jiwa, dan selisih persentasenya adalah 3%. Di Sumatera Utara, selisih penduduk laki-laki dan perempuan adalah 234.780 jiwa, dan selisih persentasenya adalah 0,2%. Selisih penduduk bekerja laki-laki dan perempuan di Sumatera Utara adalah 1.517.198 jiwa, dan selisih persentasenya adalah 8%. Di provinsi Sumatera Barat, selisih penduduk laki-laki dan perempuan adalah 42.975 jiwa, dan selisih persentasenya adalah 0,11%. Selisih penduduk bekerja laki-laki dan perempuan di Sumatera Barat adalah 106.720 jiwa, dan selisih persentasenya adalah 0,5%. Jumlah penduduk bekerja perempuan di Sumatera Barat lebih banyak daripada penduduk bekerja laki-laki. Berbeda dengan keempat wilayah Sumatera Bagian Utara yang lain. Di provinsi Riau, selisih penduduk laki-laki dan perempuan adalah 152.518 jiwa, dan selisih persentasenya adalah 0,47%. Selisih penduduk bekerja laki-laki dan perempuan adalah 917.719 jiwa, dan selisih persentasenya adalah

4,8%. Di Provinsi Kepulauan Riau, selisih penduduk laki-laki dan perempuan adalah 44.484 jiwa dan selisih persentasenya adalah 0,04%. Selisih penduduk bekerja laki-laki dan perempuan di Provinsi Riau adalah 321.685 jiwa dan selisih persentasenya adalah 1,9%. Urutan jumlah penduduk dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit adalah di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 15.115.206 jiwa, Provinsi Riau yaitu sebanyak 6.614.384 jiwa, Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 5.640.629 jiwa, di provinsi Aceh yaitu sebanyak 5.407.855 jiwa, dan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebanyak 2.179.820 jiwa. Urutan jumlah penduduk bekerja terbanyak hingga yang paling sedikit adalah di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 7.669.870 jiwa, Provinsi Sumatera barat yaitu sebanyak 5.269.608 jiwa, di Provinsi Riau yaitu sebanyak 3.148.947 jiwa, di Provinsi Aceh yaitu sebanyak 1.814.000 jiwa, dan di provinsi Kepulauan Riau yaitu sebanyak 1.005.161 jiwa.

4.2. Perkembangan Indikator Ekonomi dan Sosial Pasca Covid-19 di Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut)

4.2.1. Indikator Ekonomi di Wilayah Sumatera Bagian Utara

1. PDRB (Product Domestic Regional Bruto)

Tabel 4.3. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) di Wilayah Sumatera Bagian Utara Pada Tahun 2020-2022

Provinsi	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta)				
	2020	Persentase Kenaikan PDRB ADHK 2020 ke 2021 (%)	2021	Persentase Kenaikan PDRB ADHK 2020 ke 2021 (%)	2022
Aceh	131.580,97	2,79	135.251,19	4,21	140.947,64
Sumatera Utara	533.746,36	2,60	547.651,82	4,73	573.528,77
Sumatera Barat	169.426,61	3,29	175.000,50	4,35	182.629,54
Riau	489.995,75	3,36	506.471,91	4,55	529.532,98
Kepulauan Riau	174.959,21	3,43	180.952,44	5,09	190.163,70

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas, PDRB Atas Dasar Harga Konstan di wilayah Sumatera Bagian Utara meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 ke 2021, persentase PDRB Atas dasar harga konstan yang mengalami peningkatan tertinggi sampai terendah adalah di provinsi Kepulauan Riau yaitu meningkat sebesar 3,43%, yang kedua adalah di provinsi Riau yaitu meningkat sebesar 3,36%, yang ketiga adalah di provinsi Sumatera Barat yaitu meningkat sebesar 3,29%, yang keempat adalah di provinsi Aceh yaitu meningkat sebesar 2,79%, dan yang terendah adalah di provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 2,61%. Pada tahun 2021 ke 2022, persentase PDRB Atas dasar harga konstan yang mengalami peningkatan tertinggi sampai terendah adalah di provinsi Kepulauan Riau yaitu meningkat sebesar 5,09%, yang kedua adalah di provinsi Sumatera Utara yaitu meningkat sebesar 4,73%, yang ketiga adalah di provinsi Riau yaitu meningkat sebesar 4,55%, yang keempat adalah di provinsi Sumatera Barat yaitu meningkat sebesar 4,36%, dan yang terendah adalah di provinsi Aceh yaitu sebesar 4,21%.

2. PDRB Per Kapita

Tabel 4.4. Data PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) di Wilayah Sumatera Bagian Utara Pada Tahun 2020-2022

Provinsi	PDRB Per Kapita (Ribu)				
	2020	Persentase Kenaikan PDRB Per Kapita 2020 ke 2021 (%)	2021	Persentase Kenaikan PDRB Per Kapita 2020 ke 2021 (%)	2022
Aceh	25.018,28	2,95	25.757,70	1,18	26.063,50
Sumatera Utara	36.175,16	1,35	36.666,20	3,48	37.943,83
Sumatera Barat	30.696,21	1,86	31.268,79	3,54	32.377,51
Riau	76.884,74	1,44	77.995,51	2,64	80.057,79
Kepulauan Riau	85.012,58	0,48	85.425,89	2,12	87.238,26

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas, PDRB Per Kapita di wilayah Sumatera Bagian Utara meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 ke 2021, persentase PDRB per kapita yang mengalami peningkatan tertinggi sampai terendah adalah di provinsi Aceh yaitu meningkat sebesar 2,95%, yang kedua adalah di provinsi Sumatera Barat yaitu meningkat sebesar 1,86%, yang ketiga adalah di provinsi Riau yaitu meningkat sebesar 1,44%, yang keempat adalah di provinsi Sumatera Utara yaitu meningkat sebesar 1,35%, dan yang terendah adalah di provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 0,48%. Pada tahun 2021 ke 2022, persentase PDRB per kapita yang mengalami peningkatan tertinggi sampai terendah adalah di provinsi Sumatera Barat yaitu meningkat sebesar 3,54%, yang kedua adalah di provinsi Sumatera Utara yaitu meningkat sebesar 3,48%, yang ketiga adalah di provinsi Riau yaitu meningkat sebesar 2,64%, yang keempat adalah di provinsi Kepulauan Riau yaitu meningkat sebesar 2,12%, dan yang terendah adalah di provinsi Aceh yaitu sebesar 1,18%.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4.5. Data Pertumbuhan Ekonomi (Persen) di Wilayah Sumatera Bagian Utara Pada Tahun 2020-2022

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)			Persentase Kenaikan Perkembangan Ekonomi Pasca Covid (2020 ke 2021) (%)
	2020	2021	2022	
Aceh	-0,37	2,79	4,21	1,50
Sumatera Utara	-1,07	2,61	4,73	1,81
Sumatera Barat	-1,61	3,29	4,36	1,32
Riau	-1,13	3,36	4,55	1,35
Kepulauan Riau	-3,80	3,43	5,09	1,48

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Bagian Utara bernilai negatif karena pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyak karyawan yang dirumahkan dan PHK besar-besaran. Pada tahun 2021 ke 2022 yaitu pasca covid-19, persentase pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan tertinggi sampai terendah adalah di provinsi Sumatera Utara yaitu meningkat sebesar 1,81%, yang kedua adalah di provinsi Aceh yaitu meningkat sebesar 1,50%, yang ketiga adalah di provinsi Kepulauan Riau yaitu meningkat sebesar 1,48%, yang keempat adalah di provinsi Riau yaitu meningkat sebesar 1,35%, dan yang terendah adalah di provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 1,32%.

4. Inflasi

Tabel 4.6. Tingkat Inflasi (Persen) di Wilayah Sumatera Bagian Utara Pada Tahun 2020-2022

Provinsi	Tingkat Inflasi (%)				
	2020	Persentase Kenaikan Inflasi 2020 ke 2021 (%)	2021	Persentase Kenaikan Inflasi 2021 ke 2022 (%)	2022
Aceh	3,54	0,62	2,22	2,60	5,78
Sumatera Utara	2,55	0,70	1,79	3,50	6,27
Sumatera Barat	2,11	0,66	1,40	5,30	7,43
Riau	2,4	0,82	1,99	3,32	6,61
Kepulauan Riau	1,18	1,91	2,26	2,57	5,83

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2020 ke 2021, persentase inflasi di wilayah Sumatera Utara yang mengalami penurunan tertinggi sampai yang terendah adalah di provinsi Riau yaitu menurun sebesar 0,82%, yang kedua adalah di provinsi Sumatera Utara yaitu menurun sebesar 0,70%, yang ketiga adalah di provinsi Sumatera Barat yaitu menurun sebesar 0,66%, dan yang mengalami penurunan terendah adalah di provinsi Aceh yaitu sebesar 0,62%. Hanya persentase

inflasi di Kepulauan Riau yang meningkat yaitu sebesar 1,91%. Pada tahun 2021 ke 2022, persentase inflasi yang mengalami peningkatan tertinggi sampai terendah adalah di provinsi Sumatera Barat yaitu meningkat sebesar 5,30%, yang kedua adalah di provinsi Sumatera Utara yaitu meningkat sebesar 3,50%, yang ketiga adalah di provinsi Riau yaitu meningkat sebesar 3,32%, yang keempat adalah di provinsi Aceh yaitu meningkat sebesar 2,60%, dan yang terendah adalah di provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 2,57%.

5. Gini Ratio

Tabel 4.7. Gini Ratio di Wilayah Sumatera Bagian Utara Pada Tahun 2020-2022

Provinsi	Gini Ratio				
	2020	Nilai Kenaikan Gini Ratio 2020-2021	2021	Nilai Kenaikan Gini Ratio 2020-2021	2022
Aceh	0,323	1	0,324	0,95	0,311
Sumatera Utara	0,3161	0,99	0,3145	0,96	0,3120
Sumatera Barat	0,305	1	0,306	0,98	0,300
Riau	0,329	1	0,326	0,99	0,324
Kepulauan Riau	0,336	1,01	0,341	0,97	0,333

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas di wilayah Sumatera Bagian Utara, pada tahun 2020 ke 2021, nilai kenaikan gini ratio yang mengalami peningkatan adalah di provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 1,01. Dan di provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Aceh memiliki nilai kenaikan gini ratio yang sama yaitu 1. Sedangkan di provinsi Sumatera Utara nilai gini ratio menurun sebesar 0,99. Pada tahun 2021 ke 2022, nilai gini ratio yang mengalami peningkatan tertinggi sampai terendah adalah di provinsi Riau yaitu meningkat sebesar 0,99 yang kedua adalah di provinsi Sumatera Barat yaitu meningkat sebesar 0,98, yang ketiga adalah di provinsi Kepulauan Riau yaitu

meningkat sebesar 0,97, yang keempat adalah di provinsi Sumatera Utara yaitu meningkat sebesar 0,96%, dan yang terendah adalah di provinsi Aceh yaitu sebesar 0,95.

4.2.2. Indikator Sosial di Wilayah Sumatera Bagian Utara

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tabel 4.8. Angka Harapan Hidup (Tahun), Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun), Harapan Lama Sekolah (Tahun), dan Pengeluaran Per Kapita (Ribu) di Wilayah Sumatera Bagian Utara Pada Tahun 2020-2022

Provinsi	2020				2021				2022			
	AHH	RLS	HLS	PPK	AHH	RLS	HLS	PPK	AHH	RLS	HLS	PPK
Aceh	69,93	9,33	14,31	9.492	69,96	9,37	14,36	9.572	70,18	9,44	14,37	9.963
Sumatera Utara	69,10	9,54	13,23	10.420	69,23	9,58	13,27	10.499	69,61	9,71	13,31	10.848
Sumatera Barat	69,47	8,99	14,02	10.733	69,59	9,07	14,09	10.790	69,90	9,18	14,10	11.130
Riau	71,60	9,14	13,20	10.675	71,67	9,19	13,28	10.736	71,95	9,22	13,29	11.156
Kepulauan Riau	69,96	10,12	12,87	14.259	70,12	10,18	12,98	14.122	70,50	10,37	12,99	14.469

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2020 ke 2021, komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu Angka Harapan Hidup meningkat sebesar 0,03 tahun, Rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,04 tahun, harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,05 tahun, pengeluaran per kapita meningkat sebesar 80 rupiah. Di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu Angka Harapan Hidup meningkat sebesar 0,13 tahun, Rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,04 tahun, harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,04 tahun, pengeluaran per kapita meningkat sebesar 79 rupiah. Di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu Angka Harapan Hidup meningkat sebesar 0,12 tahun, Rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,08 tahun, harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,07 tahun, pengeluaran per kapita

meningkat sebesar 57 rupiah. Di Provinsi Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu Angka Harapan Hidup meningkat sebesar 0,07 tahun, Rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,05 tahun, harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,08 tahun, pengeluaran per kapita meningkat sebesar 61 rupiah. Di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu Angka Harapan Hidup meningkat sebesar 0,16 tahun, Rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,06 tahun, harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,11 tahun, pengeluaran per kapita meningkat sebesar 63 rupiah. Pada tahun 2021 ke 2022, komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu Angka Harapan Hidup meningkat sebesar 0,22 tahun, Rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,07 tahun, harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,01 tahun, pengeluaran per kapita meningkat sebesar 391 rupiah. Di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu Angka Harapan Hidup meningkat sebesar 0,38 tahun, Rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,13 tahun, harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,04 tahun, pengeluaran per kapita meningkat sebesar 349 rupiah. di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu Angka Harapan Hidup meningkat sebesar 0,31 tahun, Rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,11 tahun, harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,01 tahun, pengeluaran per kapita meningkat sebesar 340 rupiah. Di Provinsi Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu Angka Harapan Hidup meningkat sebesar 0,28 tahun, Rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,03 tahun, harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,01 tahun, pengeluaran per kapita meningkat sebesar 420 rupiah. Di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu Angka Harapan Hidup meningkat sebesar 0,38 tahun, Rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,19 tahun, harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,01 tahun, pengeluaran per kapita meningkat sebesar 147 rupiah.

Angka Harapan Hidup di wilayah Sumatera Bagian Utara dikategorikan cukup tinggi karena mendekati angka 70-an bahkan memasuki angka 70-an. Angka tertinggi sebagai batas untuk penghitungan indeks tertinggi adalah 85 tahun dan yang terendah adalah 25 tahun. Harapan lama sekolah yang terendah adalah di provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2020 yaitu selama 12,87 tahun. Dan harapan lama sekolah yang tertinggi adalah di provinsi Aceh pada tahun 2022 yaitu selama 14,37 tahun. Rata-rata lama sekolah yang tertinggi adalah di provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022, yaitu selama 10,37 tahun. Dan rata-rata lama sekolah yang terendah adalah di provinsi Sumatera Barat, yaitu selama 8,99 tahun pada tahun 2020. Pemerintah menerapkan program “Wajib Belajar 12 Tahun”. Sayangnya rata-rata lama sekolah di wilayah Sumatera Bagian Utara tidak mencapai program “Wajib Belajar 12 Tahun”. Pengeluaran per kapita di wilayah Sumatera Bagian Utara yang terkecil adalah di provinsi Aceh pada tahun 2020, yaitu sebesar 9.492 rupiah. Dan pengeluaran per kapita yang terbesar adalah di provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 yaitu sebesar 14.469 rupiah.

2. Kemiskinan

Tabel 4.9. Tingkat Kemiskinan (Persen), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa), Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan (Rupiah) di Wilayah Sumatera Bagian Utara Pada Tahun 2020-2022

Provinsi	2020				2021				2022			
	TK	JPM	IKK	GK	TK	JPM	IKK	GK	TK	JPM	IKK	GK
Aceh	15,21	1.648,82	2,72	522.126	15,43	1.684,50	2,86	541.109	14,6	1.625,29	2,49	579.227
Sumatera Utara	8,94	2.640,01	1,51	502.904	8,75	2.616,93	1,52	525.756	8,37	2.548,28	1,36	561.004
Sumatera Barat	6,42	709,02	0,92	544.315	6,33	710,60	1,04	568.703	5,98	679,03	0,80	610.941
Riau	6,93	974,61	1,14	544.057	7,06	997,47	1,06	565.937	6,81	978,16	1,10	605.912
Kepulauan Riau	6,02	274,58	1,11	614.727	5,93	282,21	1,07	642.425	6,13	300,57	1,05	684.070

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel diatas, tingkat kemiskinan di wilayah Sumatera Bagian Utara mengalami fluktuaktif. Pada tahun 2020 ke 2021, tingkat kemiskinan di provinsi Aceh dan Riau mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,22% dan 0,13%. Sedangkan tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau menurun yaitu sebesar 0,19%, 0,09%, dan 0,09%. Pada tahun 2021 ke 2022, tingkat kemiskinan di wilayah Sumatera Bagian Utara menurun kecuali di provinsi Kepulauan Riau yang meningkat sebesar 0,2%. Jumlah penduduk miskin di wilayah Sumatera Bagian Utara mengalami fluktuaktif. Pada tahun 2020 - 2021, jumlah penduduk miskin di wilayah Sumatera Bagian Utara mengalami peningkatan kecuali di provinsi Sumatera Utara yaitu mengalami penurunan sebanyak 23,08 ribu jiwa. Dan pada tahun 2021 ke 2022, jumlah penduduk miskin di wilayah Sumbagut menurun kecuali di provinsi Kepulauan Riau yaitu meningkat sebanyak 18,36 ribu jiwa. Indeks kedalaman kemiskinan di wilayah Sumatera Bagian Utara mengalami fluktuaktif. Pada tahun 2020 ke 2021, indeks kedalaman kemiskinan di wilayah Sumbagut mengalami peningkatan yaitu di provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan di provinsi Sumatera Barat. Dan wilayah Sumbagut yang mengalami penurunan adalah di provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Pada tahun 2021 ke 2022, indeks kedalaman kemiskinan di wilayah Sumatera Bagian Utara menurun kecuali di provinsi Riau yaitu meningkat sebesar 0,02. Pada tahun 2020-2022, garis kemiskinan di wilayah Sumatera Bagian Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Angka garis kemiskinan yang tertinggi adalah di provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022, yaitu sebesar 684.070 rupiah, dan angka garis kemiskinan yang terendah adalah di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020, yaitu sebesar 502.904 rupiah.

4.2.3. Sektor yang Mendominasi di Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Pada Tahun 2020-2022

Tabel 4.10. PDRB Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, Tahun 2020-2022 Dalam Satuan Juta Rupiah

1. Provinsi Aceh

Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.80	27.92	27.67
B Pertambangan dan Penggalian	7.97	7.69	7.70
C Industri Pengolahan	4.60	4.59	4.59
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.17	0.16	0.16
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.04	0.04	0.04
F Konstruksi	10.56	10.23	9.59
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.62	14.82	15.13
H Transportasi dan Pergudangan	5.36	6.23	6.42
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.25	1.15	1.46
J Informasi dan Komunikasi	3.94	4.13	4.40
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.79	1.65	1.49
L Real Estat	4.14	4.19	4.18
M,N Jasa Perusahaan	0.64	0.62	0.67
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8.71	9.01	8.64
P Jasa Pendidikan	2.78	2.73	2.72
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.17	3.38	3.56

R,S,T,U Jasa Lainnya	1.45	1.45	1.58
PDRB	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2020-2022, sektor pertama yang mendominasi di provinsi Aceh adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari tahun 2020-2022 adalah 28,80%, 27,92%, dan 27,67%. Nilai kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar 0,88% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan sebesar 0,25%. Jadi, nilai kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tertinggi adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 28,80% dan yang terkecil adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 27,67%. Sektor kedua yang mendominasi di provinsi Aceh adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dari tahun 2020-2022 adalah 14,62%, 14,82%, dan 15,13%. Nilai kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dari tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,20% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,31%. Jadi, nilai kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran yang tertinggi adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 15,13% dan yang terkecil adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 14,62%. Sektor ketiga yang mendominasi di provinsi Aceh adalah sektor konstruksi. Kontribusi sektor konstruksi dari tahun 2020-2022 adalah 10,56%, 10,23%, dan 9,59%. Nilai kontribusi sektor konstruksi dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar 0,33% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan sebesar 0,64%. Jadi, nilai kontribusi sektor konstruksi yang tertinggi adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 10,56% dan yang terkecil adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 9,59%. Sektor pertama terkecil di provinsi Aceh pada tahun 2020-2022 adalah sektor pengadaan air. Kontribusi sektor pengadaan air dari tahun 2020-2022 adalah 0,04% dan nilai kontribusi sektor tersebut tidak mengalami perubahan. Kontribusi sektor kedua terkecil di

provinsi Aceh pada tahun 2020-2022 adalah sektor jasa perusahaan yaitu sebesar 0,64%, 0,62%, dan 0,67%. Nilai kontribusi sektor jasa perusahaan dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar 0,02% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,05%. Jadi, nilai kontribusi sektor jasa perusahaan tertinggi adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,67% dan yang terkecil adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,62%. Sektor ketiga terkecil di provinsi Aceh adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2020-2022 adalah 1,25%, 1,15%, dan 1,46%. Nilai kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar 0,10% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,31%. Jadi, nilai kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tertinggi adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,46% dan yang terendah adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,15%.

2. Provinsi Sumatera Utara

Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.54	25.86	25.97
B Pertambangan dan Penggalian	1.30	1.29	1.27
C Industri Pengolahan	18,09	17.88	17.41
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.14	0.14	0.14
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.10	0.10	0.10
F Konstruksi	12.52	12.47	12.25
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.82	18.00	18.31
H Transportasi dan Pergudangan	4.21	3.96	4.26
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.25	2.17	2.22

J Informasi dan Komunikasi	3.06	3.17	3.26
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2.87	2.92	2.90
L Real Estat	4.34	4.33	4.32
M,N Jasa Perusahaan	0.88	0.86	0.89
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.34	3.32	3.15
P Jasa Pendidikan	2.08	2.09	2.10
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.95	0.93	0.93
R,S,T,U Jasa Lainnya	0.51	0.50	0.52
PDRB	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2020-2022, sektor pertama yang mendominasi di provinsi Sumatera Utara adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari tahun 2020-2022 adalah 25,54%, 25,86%, dan 25,97%. Nilai kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,32% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,11%. Jadi, nilai kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tertinggi adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 25,54% dan yang terkecil adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 25,97%. Sektor kedua yang mendominasi di provinsi Sumatera Utara adalah sektor industry pengolahan. Kontribusi sektor industry pengolahan dari tahun 2020-2022 adalah 18,09%, 17,88%, dan 17,41%. Nilai kontribusi sektor industry pengolahan dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar 0,21% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan sebesar 0,47%. Jadi, nilai kontribusi sektor industry pengolahan yang tertinggi adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 18,09% dan yang terkecil adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 17,41%. Sektor ketiga yang mendominasi di provinsi Sumatera Utara adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dari tahun 2020-2022 adalah 17,82%, 18%, dan

18,31%. Nilai kontribusi sektor konstruksi dari tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,18% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,31%. Jadi, nilai kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran yang tertinggi adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 18,31% dan yang terkecil adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 17,82%. Sektor pertama terkecil di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020-2022 adalah sektor pengadaan air. Kontribusi sektor pengadaan air dari tahun 2020-2022 adalah 0,10% dan nilai kontribusi sektor tersebut tidak mengalami perubahan. Sektor kedua terkecil di provinsi Sumatera Utara adalah sektor pengadaan listrik dan gas. Kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020-2022 adalah sebesar 0,14% dan nilai kontribusi sektor tersebut tidak mengalami perubahan. Sektor ketiga terkecil di provinsi Sumatera Utara adalah sektor jasa lainnya. Kontribusi sektor jasa lainnya pada tahun 2020-2022 adalah 0,51%, 0,50%, dan 0,52%. Pada tahun 2020 ke 2021, nilai kontribusi sektor jasa lainnya menurun sebesar 0,01% dan pada tahun 2021 ke 2022 meningkat sebesar 0,52%.

3. Provinsi Sumatera Barat

Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.42	22.18	22
B Pertambangan dan Penggalian	4.14	3.9	3.9
C Industri Pengolahan	9,46	9.5	9.26
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.1	0.1	0.1
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.09	0.1	0.1
F Konstruksi	9.3	9.25	9.1
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.26	16.6	16.74
H Transportasi dan Pergudangan	10.35	10.29	10.42

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.98	1	1.11
J Informasi dan Komunikasi	8.24	8.5	8.7
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2.87	3	3
L Real Estat	2	2	2
M,N Jasa Perusahaan	0.43	0.42	0.43
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5.8	5.62	5.45
P Jasa Pendidikan	4.32	4.12	4.24
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.6	1.63	1.63
R,S,T,U Jasa Lainnya	1.64	1.7	1.82
PDRB	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2020-2022, sektor pertama yang mendominasi di provinsi Sumatera Barat adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari tahun 2020-2022 adalah 22,42%, 22,18%, dan 22%. Nilai kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar 0,24% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan sebesar 0,18%. Jadi, nilai kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tertinggi adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 22,42% dan yang terkecil adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 22%. Sektor kedua yang mendominasi di provinsi Sumatera Barat adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dari tahun 2020-2022 adalah 16,26%, 16,6%, dan 16,74%. Nilai kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dari tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,20% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,68%. Jadi, nilai kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran yang tertinggi adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 16,74% dan yang terkecil adalah pada tahun 2021

yaitu sebesar 16,6%. Sektor ketiga yang mendominasi di provinsi Sumatera Barat adalah sektor transportasi dan pergudangan. Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan dari tahun 2020-2022 adalah 10,35%, 10,29%, dan 10,42%. Nilai kontribusi sektor transportasi dan pergudangan dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar 0,06% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,13%. Jadi, nilai kontribusi sektor transportasi dan pergudangan yang tertinggi adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 10,42% dan yang terkecil adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar 10,29%. Sektor pertama terkecil di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020-2022 adalah sektor pengadaan air. Kontribusi sektor pengadaan air dari tahun 2020-2022 adalah 0,09%, 0,1% dan 0,1%. Nilai kontribusi sektor pengadaan air dari tahun 2020 ke 2021 meningkat sebesar 0,01%. Dari tahun 2021 ke 2022, nilai kontribusi sektor tersebut tidak mengalami perubahan. Kontribusi sektor kedua terkecil di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020-2022 adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 0,1%. Dari tahun 2020-2022, nilai kontribusi sektor tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali. Sektor ketiga terkecil di provinsi Sumatera Barat adalah sektor jasa perusahaan. Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2020-2022 adalah 0,43%, 0,42%, dan 0,43%. Nilai kontribusi sektor jasa perusahaan dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar 0,01% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,01%. Jadi, nilai kontribusi sektor jasa perusahaan yang terendah adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,42% dan nilai kontribusi sektor jasa perusahaan tahun 2020 dan 2022 tidak mengalami perubahan sama sekali yaitu 0,43%.

4. Provinsi Riau

Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26.75	26.55	24.69
B Pertambangan dan Pengalihan	17.73	19.99	23.43
C Industri Pengolahan	28.49	28.06	27.36
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.08	0.08
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01
F Konstruksi	9.70	9.00	8.57
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.30	9.89	9.79
H Transportasi dan Pergudangan	0.73	0.68	0.74
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.46	0.47	0.46
J Informasi dan Komunikasi	0.88	0.82	0.76
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0.99	0.95	0.92
L Real Estat	0.97	0.87	0.81
M,N Jasa Perusahaan	0.00	0.00	0.00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.56	1.38	1.25
P Jasa Pendidikan	0.61	0.55	0.49
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.27	0.26	0.23
R,S,T,U Jasa Lainnya	0.47	0.43	0.41
PDRB	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2020-2022, sektor pertama yang mendominasi di provinsi Riau adalah sektor industry pengolahan. Kontribusi sektor industry pengolahan dari tahun 2020-2022 adalah 28,49%, 28,06%, dan 27,36%. Nilai kontribusi sektor industry

pengolahan dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar 0,43% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan sebesar 0,70%. Jadi, nilai kontribusi sektor industry pengolahan yang tertinggi adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 28,49% dan yang terkecil adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 27,36%. Sektor kedua yang mendominasi di provinsi Riau adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari tahun 2020-2022 adalah 26,75%, 26,55%, dan 24,69%. Nilai kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar 0,20% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan sebesar 1,86%. Jadi, nilai kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tertinggi adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 26,75% dan yang terkecil adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 24,69%. Sektor ketiga yang mendominasi di provinsi Riau adalah sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2020-2022 adalah 17,73%, 19,99%, dan 23,43%. Nilai kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,26% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,44%. Jadi, nilai kontribusi sektor pertambangan dan penggalian yang tertinggi adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 23,43% dan yang terkecil adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 17,73%. Sektor pertama terkecil di provinsi Riau pada tahun 2020-2022 adalah sektor pengadaan air. Kontribusi sektor pengadaan air dari tahun 2020-2022 adalah 0,01%. Nilai kontribusi sektor pengadaan air dari tahun 2020-2022 tidak mengalami perubahan sama sekali. Kontribusi sektor kedua terkecil di provinsi Riau pada tahun 2020-2022 adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 0,09%. Dari tahun 2020-2022, nilai kontribusi sektor tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali. Sektor ketiga terkecil di provinsi Riau adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kontribusi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada tahun 2020-2022 adalah 0,27%, 0,26%, dan 0,23%. Nilai kontribusi

sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar 0,01% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan sebesar 0,03%. Jadi, nilai kontribusi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang terendah adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,23% dan nilai kontribusi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tertinggi adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,27%.

5. Provinsi Kepulauan Riau

Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.12	2.95	2.9
B Pertambangan dan Penggalian	14.25	13.67	12.10
C Industri Pengolahan	40.16	42	41.75
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.9	0.91	1
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.12	0.12	0.12
F Konstruksi	18.14	18.37	18.45
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.68	7.5	8.11
H Transportasi dan Pergudangan	1.46	1.4	1.82
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.44	1.3	1.85
J Informasi dan Komunikasi	3.08	3.26	3.40
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2.74	2.67	2.65
L Real Estat	1.33	1.24	1.24
M,N Jasa Perusahaan	0.003	0.003	0.003
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.51	2.22	2.18
P Jasa Pendidikan	1.30	1.20	1.18
Q Jasa Kesehatan dan	0.95	1.04	1

Kegiatan Sosial			
R,S,T,U Jasa Lainnya	0.16	0.15	0.24
PDRB	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2020-2022, sektor pertama yang mendominasi di provinsi Kepulauan Riau adalah sektor industry pengolahan. Kontribusi sektor industry pengolahan dari tahun 2020-2022 adalah 40,16%, 42%, dan 41,75%. Nilai kontribusi sektor industry pengolahan dari tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,16% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan sebesar 0,25%. Jadi, nilai kontribusi sektor industry pengolahan yang tertinggi adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar 42% dan yang terkecil adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 40,16%. Sektor kedua yang mendominasi di provinsi Kepulauan Riau adalah sektor kontruksi. Kontribusi sektor kontruksi dari tahun 2020-2022 adalah 18,14%, 18,37%, dan 18,45%. Nilai kontribusi sektor kontruksi dari tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,27% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,08%. Jadi, nilai kontribusi sektor kontruksi yang tertinggi adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 18,45% dan yang terkecil adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 18,14%. Sektor ketiga yang mendominasi di provinsi Kepulauan Riau adalah sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2020-2022 adalah 14,25%, 13,67%, dan 12,10%. Nilai kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar 0,58% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan sebesar 1,57%. Jadi, nilai kontribusi sektor pertambangan dan penggalian yang tertinggi adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 14,25% dan yang terkecil adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 12,10%. Sektor pertama terkecil di provinsi Riau pada tahun 2020-2022 adalah sektor jasa perusahaan. Kontribusi sektor jasa perusahaan dari tahun 2020-2022 adalah 0,003%. Nilai kontribusi sektor jasa perusahaan dari tahun 2020-2022 tidak mengalami perubahan sama sekali.

Kontribusi sektor kedua terkecil di provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020-2022 adalah sektor pengadaan air yaitu sebesar 0,12%. Dari tahun 2020-2022, nilai kontribusi sektor tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali. Sektor ketiga terkecil di provinsi Kepulauan Riau adalah sektor jasa lainnya. Kontribusi sektor jasa lainnya pada tahun 2020-2022 adalah 0,16%, 0,15%, dan 0,24%. Nilai kontribusi sektor jasa lainnya dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar 0,01% dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,09%. Jadi, nilai kontribusi sektor jasa lainnya yang terendah adalah pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,15% dan nilai kontribusi sektor jasa lainnya yang tertinggi adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,24%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Perkembangan ekonomi di wilayah Sumatera Bagian Utara dapat dikatakan baik. Dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, PDRB, PDRB per Kapita, dan Gini ratio yang menurun. Namun sayangnya, inflasi di wilayah Sumatera Bagian Utara mengalami peningkatan di tahun 2022. Walaupun inflasi mengalami peningkatan, namun masih termasuk di kategori inflasi ringan

2. Faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan ekonomi adalah Kemiskinan dan Indeks Pertumbuhan Manusia. Meskipun kemiskinan menurun dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat setiap tahunnya, tetapi rata-rata lama sekolah tidak mencapai target (harapan lama sekolah).

3. Sektor yang mendominasi di wilayah Sumatera Bagian Utara adalah sektor pengolahan industry, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran.

5.2. Saran

Diperlukannya perhatian khusus dan kebijakan untuk Indeks Pembangunan Manusia sebagai proses perkembangan ekonomi di wilayah Sumatera Bagian Utara (terkhusus untuk memperbaiki rata-rata lama sekolah karena tidak mencapai target). Pendidikan di Indonesia terkhusus di wilayah Sumatera Bagian Utara harus disejahterakan agar tidak mengalami kemunduran.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuznets, Simon. "Economic growth and income inequality." *The American Economic Review*, 1955. 1-28.
- Jhingan, M. L. "*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*." Jakarta: Rajawali Pers (2012).
- Kamarudin, 2010. "*Analisis Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Jember*," Jurnal Ekonomi Universitas Abdurrahman Saleh.
- Sukirno, Sadono, 2012. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : Rajawali
- Todaro, M.P., dan S.C. Smith.2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Jakarta : Erlangga.
- Suryana.2000., :*Ekonomi Pembangunan : Problematika dan Pendekatan.*," Salemba Empat, Edisi Pertama : Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 2010. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. PT Raja Grafindo Persada
- Boediono (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPF E Erlangga
- Boediono (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPF E Erlangga
- Boediono (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPF E Erlangga
- Boediono (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPF E Erlangga
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi Makro Edisi Ketiga*. Jakarta : Salemba Empat
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi Makro Edisi Ketiga*. Jakarta : Salemba Empat
- Sukirno, Sadono, 2002. *Makro Ekonomi Modern*. PT Rajawali Grafindo Persada : Jakarta

Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta : STIM YKPM

Mankiw, Gregory N. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Boediono (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE UGM

Boediono (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE UGM

Todaro, Michael P, and Smith Stephen C. 2015. *Economic Development. Twelfth e.d. Harlow, M.K : Pearson*

Adji, Wahyu, Suweli & Suratno (2017). *Pengantar Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta : Penerbit Erlangga

Muqorrobin, M. (2017). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

Natsir, M. 2014. *Ekonomi Moneter dan Kebanksetralan*. Jakarta

Pratama Rahardja, *Teori Ekonomi Makro, Suatu Pengantar*. Edisi Keempat, 2008

Iskandar Putong. (2002), *Economics : Pengantar Mikro dan Makro*. 403

Iskandar Putong. (2002), *Economics : Pengantar Mikro dan Makro*. 403

Prasetyo, P. Eko. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta : Beta Offset

Glaeser E.L. 2006. *Inequality*. Barry R Weingast BR, Witmann DA, editor. *The Oxford Handbook of Political Economy : Oxford University Press Inc. New York*

Todaro, M.P., dan S.C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Jakarta : Erlangga.

Todaro, M.P., dan S.C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Jakarta : Erlangga.

Arsyad, Lincoln. 2002. *Ekonomi Daerah: Pengantar Perencanaan Pembangunan*. 3 ed. Yogyakarta: BPFE.

Herrick, Bruce/Charles P Kindleberger. 1988, *Ekonomi Pembangunan*, terjemahan Drs. Komarudin, Bina Aksara, Jakarta.

Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbitan : STIE YKPN. Yogyakarta

Djojohadikusumo, Sumitro. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.

Ravallion, Martin, 2001. *Growth Inequality and Poverty : Looking Beyond Averages*. *World Development*

Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.

Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.

Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP. YKPN. Yogyakarta : Jamasy

Tambunan. T.H. Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta, Ghalia Indonesia

Saleh, S. (2002). *Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional Di Indonesia*.